

**PENGARUH UKURAN KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN KEPEMILIKAN
ASING TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* (CSR)**



Nama : Ahmad Rizal Purwanto

No. Mahasiswa: 12312209

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**PENGARUH UKURAN KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN KEPEMILIKAN
ASING TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)***

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama : Ahmad Rizal Purwanto

No. Mahasiswa: 12312209

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 11 Mei 2020



Penulis,

Ahmad Rizal Purwanto

**PENGARUH UKURAN KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN KEPEMILIKAN
ASING TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)***

SKRIPSI



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 Mei 2020

Dosen Pembimbing,



Johan Arifin, SE., M.Si., PhD., CFA.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH UKURAN KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN,
KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN
KELUARGA, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

Disusun Oleh : **AHMAD RIZAL PURWANTO**

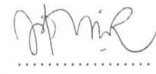
Nomor Mahasiswa : **12312209**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 07 Juli 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Johan Arifin,,S.E., M.Si., Ph.D.**

Penguji : **Yunan Najamudin,Drs.,M.B.A.**



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Rahman dan Maha Rahim yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi untuk membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa seperti saat ini.

Penyusunan skripsi yang berjudul **“PENGARUH UKURAN KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)”** disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Sarjana (Strata-1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

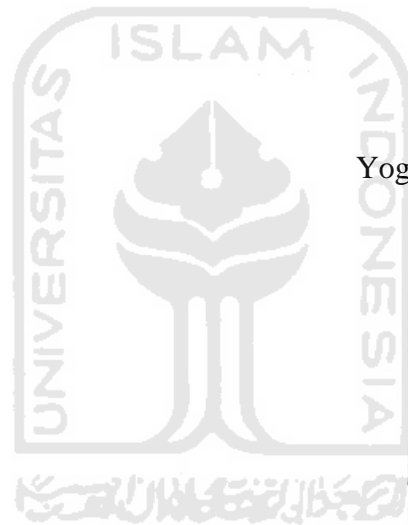
Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada henti, serta atas segala kemudahan yang telah diberikan,
2. Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan, panutan, dan juru selamat bagi umat manusia,
3. Kedua orangtua penulis, Babeh (Drs. Joko Purwanto) dan Mama (Siti Chalimah S.Pd., M.Pd) yang menjadi anugerah terindah bagi penulis, pelindung, kasih sayang tiada batas, kesabaran yang tak bisa diukur dan yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat serta menjadi motivasi terbesar bagi penulis,
4. Kakak-kakak (Ahmad Aldian Purwanto dan Ahmad Bramantyo) beserta keponakan-keponakan tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang luar biasa bermanfaat,
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
6. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia,
7. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFrA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia,
8. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFrA., selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas segala do'a, semangat, motivasi, kesabaran, ilmu, pengalaman, waktu, perhatian dan segala bimbingan serta arahnya kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, ada rasa kebanggaan tersendiri mendapat kesempatan untuk kenal dan dibimbing oleh beliau,

9. Seluruh Bapak/Ibu dosen, pegawai dan *staff* Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan waktu dan membekali ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan,
10. Keluarga Besar OCB F (Putri, Adika, Andin, Alfi, Anin, Aucky, Dandi, Dea, Erin, Gama, Ikhfi, Jihan, Olin, Karom, Kiky, Lisa, Masni, Abel, Irsan, Lia, Puji, Ruruh, Tara, Yeni), teman seperjuangan yang selalu memberikan banyak cerita, pengalaman, ilmu, dan motivasi kepada penulis,
11. Keluarga Besar Marching Band Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan do'a, dukungan, pengalaman, rasa kekeluargaan, dan kepercayaan kepada penulis,
12. Keluarga Besar Marching Band Domenico Savio (SMP PL Domenico Savio Semarang) yang selalu memberikan do'a, dukungan, pengalaman, rasa kekeluargaan, dan kepercayaan kepada penulis,
13. Teman-teman Jurusan Akuntansi UII angkatan 2012 dan semua pihak yang turut serta membantu penulis di segala bidang kehidupan yang tak dapat ditulis satu persatu,
14. Keluarga Besar KKN Unit - 13 (Bapak Ngatino beserta istri, Mas Supri, Mas Kisno, Mas Bagong, Mas Trimmo, Mbak Karmi, Mas Gareng, Eka Permata P., Yudha Perwira, Rizky Prayogi, Novi Anggraeni, Yana Yunita, Herianto P. Siregar dan Zuniaji Saputra) terima kasih atas pengalaman hidup dan dukungan kepada penulis,
15. Bunga Ichlasul Amal Damayanti dan keluarga yang selalu memberi dukungan, semangat, motivasi, do'a, kesabaran, bantuan, dan selalu menemani di keadaan terpuruk, terima kasih yang sebesar-besarnya dari penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik membangun yang dapat membantu kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 13 Mei 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Ahmad Rizal Purwanto'. The signature is written in a cursive style.

Ahmad Rizal Purwanto

MOTTO

“Sungguh, Bersama Kesukaran itu Pasti ada Kemudahan”

(Al-Insyirah : 5)

“Sapa tekun golek teken, bakal tekan”

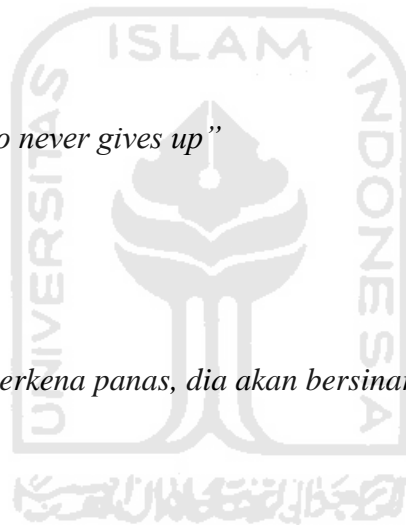
(Pepatah Jawa)

“A winner is a dreamer who never gives up”

(Nelson Mandela)

Berlian tidak akan hancur terkena panas, dia akan bersinar”

(Ahmad Rizal P)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya kecil ini, kupersembahkan untuk:

Orangtua dan kakakku tersayang dan tercinta...

Keluarga tercintaku, dan orang-orang yang kusayangi...

Sahabat dan teman-teman tersayang...

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar	vi
Halaman Motto.....	x
Halaman Persembahan	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran	xvii
Abstract	xviii
Abstrak	xix
BAB I	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	8
BAB II.....	9
2.1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	9
2.1.1 Pengertian dan Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i>	9
2.1.2 Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	10
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	11
2.3 LANDASAN TEORI	16
2.3.1 Teori Legitimasi	16
2.3.2 Teori Agensi.....	17
2.4 GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	19
2.4.1 Ukuran Komite Audit.....	21
2.4.2 Dewan Komisaris Independen	23
2.4.3 Kepemilikan Pemerintah.....	24

2.4.4	Kepemilikan Institusional	25
2.4.5	Kepemilikan Keluarga	26
2.4.6	Kepemilikan Asing.....	27
2.5	PENGEMBANGAN HIPOTESIS	28
2.5.1	Ukuran Komite Audit.....	28
2.5.2	Komposisi Dewan Komisaris Independen	28
2.5.3	Komposisi Kepemilikan Pemerintah.....	29
2.5.4	Komposisi Kepemilikan Institusional	30
2.5.5	Komposisi Kepemilikan Keluarga	31
2.5.6	Komposisi Kepemilikan Asing	32
2.6	KERANGKA PEMIKIRAN	33
BAB III	35
3.1	POPULASI DAN SAMPEL	35
3.2	JENIS DAN SUMBER DATA	36
3.3	DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL	36
3.3.1	Variabel Dependen.....	37
3.3.2	Variabel Independen	38
3.4	METODE PENGUMPULAN DATA	39
3.5	METODE ANALISIS DATA	40
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	40
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	40
3.5.3	Analisis Regresi Berganda	43
3.5.4	Pengujian Hipotesis.....	44
3.5.5	Uji Adjusted R Squared (Adj. R ²).....	46
3.5.6	Uji Parsial (t test)	46
BAB IV	47
4.1	POPULASI DAN SAMPEL	47
4.2	ANALISIS DESKRIPTIF	48
4.3	UJI ASUMSI KLASIK	51
4.3.1	Uji Normalitas.....	51
4.3.2	Uji Multikolinieritas.....	52
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	53
4.3.4	Uji Autokorelasi	54
4.4	ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA.....	55

4.5	UJI ADJUSTED R SQUARED (ADJ. R ²)	57
4.6	UJI HIPOTESIS	57
4.6.1	Pembahasan Hipotesis Pertama.....	57
4.6.2	Pembahasan Hipotesis Kedua	58
4.6.3	Pembahasan Hipotesis Ketiga.....	59
4.6.4	Pembahasan Hipotesis Keempat	61
4.6.5	Pembahasan Hipotesis Kelima.....	62
4.6.6	Pembahasan Hipotesis Keenam	63
BAB V	65
5.1	SIMPULAN.....	65
5.2	IMPLIKASI PENELITIAN.....	67
5.3	KETERBATASAN PENELITIAN	68
5.4	SARAN	68
DAFTAR REFERENSI	70
LAMPIRAN	74



DAFTAR TABEL

2. 1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	14
4. 1	Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian	47
4. 2	Hasil Analisis Deskriptif	48
4. 3	Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	52
4. 4	Hasil Uji Multikolinearitas.....	52
4. 5	Hasil Uji Autokorelasi.....	54
4. 6	Hasil Uji <i>t (t-Test)</i>	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Skema Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4. 1	Grafik <i>Scatterplot</i>	53



DAFTAR LAMPIRAN

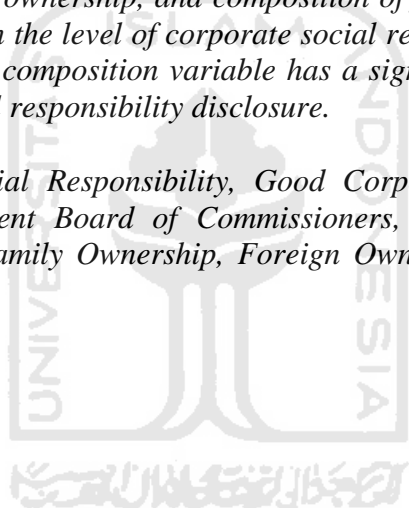
Lampiran 1	Daftar <i>Check List Index Corporate Social Responsibility</i>	75
Lampiran 2	Data Perusahaan Sampel	79
Lampiran 3	Nilai Setiap Variabel Tahun 2016	82
Lampiran 4	Nilai Setiap Variabel Tahun 2017	89
Lampiran 5	Nilai Setiap Variabel Tahun 2018	96
Lampiran 6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017.....	103
Lampiran 7	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1.....	105
Lampiran 8	Hasil Uji Statistik.....	108



ABSTRACT

The purpose of this study is to gain additional knowledge and empirical evidence regarding independent variables, namely the size of the audit committee, the composition of the independent board of commissioners, the composition of government ownership, the composition of institutional ownership, the composition of family ownership and the composition of foreign ownership and its effect on the dependent variable, namely the level of disclosure corporate social responsibility. This study uses secondary data from a sample of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016 to 2018 by using the Global Reporting Initiative (GRI) as a guide to CSR indexes. Processing and analysis of data in this study using multiple linear regression with SPSS 21.0 software tools. Collecting data in this study through a purposive sampling method that produces 372 companies from a total population of 438 manufacturing companies. The results of this study indicate that size of audit committee, composition independent board of commissioners, composition of government ownership, and composition of foreign ownership have a significant positive effect on the level of corporate social responsibility disclosure. In addition, family ownership composition variable has a significant negative effect on the level of corporate social responsibility disclosure.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Audit Committee Size, Independent Board of Commissioners, Government Ownership, Institutional Ownership, Family Ownership, Foreign Ownership, Global Reporting Initiative.*



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan bukti empiris mengenai variabel-variabel independen yaitu ukuran komite audit, komposisi dewan komisaris independen, komposisi kepemilikan pemerintah, komposisi kepemilikan institusional, komposisi kepemilikan keluarga dan komposisi kepemilikan asing dan pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sampel perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2018 dengan menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai pedoman indeks CSR. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan alat bantu *software SPSS 21.0*. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode *purposive sampling* yang menghasilkan 372 perusahaan dari total populasi sebanyak 438 perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit, komposisi dewan komisaris independen, komposisi kepemilikan pemerintah, dan komposisi kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Selanjutnya, variabel komposisi kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif signifikan tingkat terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Ukuran Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Asing, Global Reporting Initiative.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Arus informasi yang terbuka, dinamika perubahan yang demikian cepat, dan persaingan yang begitu ketat saat ini telah menjadi tren di perkembangan dunia bisnis global. Ketika perusahaan semakin berkembang, pada saat itu pula tantangan dalam menerapkan standar-standar etis terhadap praktek bisnis yang bertanggung jawab, yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan meningkat. Maksimalisasi laba yang dulu menjadi orientasi utama program CSR kini bergerak menjadi peduli dengan lingkup sosial masyarakat serta keseimbangan lingkungan. Pentingnya praktek CSR bagi perusahaan dikarenakan lokasi berdirinya perusahaan seringkali berdekatan dengan pemukiman warga dan lingkup sosial masyarakat, kemudian operasional dari perusahaan tersebut memiliki dampak secara sosial maupun dampak lingkungan. Pelaksanaan CSR menjadi media yang dirasa oleh perusahaan cukup efektif dan relevan dalam upaya pencegahan konflik dengan *social environment*. Disisi lain, perusahaan publik beranggapan bahwa kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi penggambaran prinsip *accountability* (Claudya, 2015).

Dalam Husaini dan Suhadak (2015) dijelaskan bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan perwujudan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya atas aktivitas operasional perusahaan. CSR diharapkan dapat membentuk karakter perusahaan yang *acceptable* dan *sustainable*.

Penerapan prinsip GCG dan CSR secara konsisten dengan tetap menyeimbangkan keinginan pihak eksternal maupun internal akan berdampak positif pada aktivitas perusahaan yaitu akan *sustainable* dan *going concern*. Pengungkapan CSR akan menjadikan nilai tambah dan dapat memperbaiki citra perusahaan dikalangan investor yang dimana hal ini akan dapat meningkatkan pencapaian finansial tanpa mengabaikan faktor-faktor sosial dan lingkungan nya.

Menurut *Global Reporting Initiatives* (2013), saat ini prinsip *going concern* atau keberlanjutan operasional semakin menjadi fokus bagi banyak perusahaan, entitas, dan beragam organisasi. Selain itu, keuntungan yang akan diperoleh semakin diperhitungkan dan diharapkan sejalan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Indarawan (2010) dalam Setyawan (2016) memaparkan sebuah penjelasan bahwa kebermanfaatan untuk pihak *stakeholders* menjadi salah satu alasan penggunaan CSR, dan juga menjadi metode agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan bisnis para pemilik saham (*shareholders*).

Upaya penerapan dan pengungkapan aktivitas CSR di Indonesia telah dijalankan melalui regulasi pemerintah dalam UU No. 40 tahun 2007 pada Pasal 74 berisi aturan tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Upaya lain dilakukan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengeluarkan POJK no. 51 tahun 2017 yang menyatakan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Pasal 1 ayat 8 yang

berbunyi “Keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup”. Selain untuk mendorong praktik dan pengungkapan CSR, peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan bertujuan untuk memenuhi tuntutan akan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

Krisis ekonomi pada tahun 1997 di Indonesia membuat konsep GCG semakin dikenal luas. Krisis yang berkepanjangan dinilai disebabkan oleh tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggung jawab, diabaikannya regulasi yang berlaku serta sarat dengan praktek-praktek KKN. Prabudi dan Suana (2015) dalam Setyawan (2016) memaparkan mengenai upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonomi yaitu dengan cara bekerjasama dengan *International Monetary Fund* (IMF), melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) sehingga mendorong terlaksananya *Good Corporate Governance* pada iklim yang lebih kondusif. Kemudian upaya pemerintah Indonesia untuk merespon tindakan perbaikan di bidang *corporate governance* yaitu dengan membentuk sebuah lembaga khusus yaitu Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang memiliki landasan prinsip dasar yaitu: *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Lembaga tersebut mampu merekomendasikan, memprakarsai, serta memantau rencana kebijakan nasional mengenai kerangka kerja tata kelola perusahaan .

Penelitian-penelitian mengenai *Good Corporate Governance* yang secara spesifik mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* telah dilakukan oleh Wibawa

(2014), Claudya (2015), Habbash (2015), Setyawan (2016), Siregar (2017), Husaini dan Jayanti (2018), Anwar dan Fajari (2019). Variabel ukuran komite audit, komposisi dewan komisaris independen, komposisi kepemilikan pemerintah, komposisi kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, dan komposisi kepemilikan asing menjadi beberapa variabel yang dipakai dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Pada penelitian yang telah dilakukan, ketidakkonsistenan hasil ditunjukkan oleh variabel-variabel yang dianggap mewakili *corporate governance* dalam pengaruhnya terhadap *corporate social responsibility*. Hal tersebut dapat diambil contoh pada Wibawa (2014) yang memaparkan mengenai kepemilikan institusional mampu berefek pada kualitas pengungkapan CSR, pada sisi lain Siregar (2017) menunjukkan hasil yaitu kepemilikan institusional tidak memiliki dampak terhadap kualitas pengungkapan CSR. Pada pengujian Setyawan (2016) dipaparkan mengenai komite audit yang secara positif signifikan berdampak luasnya pengungkapan, sedangkan menurut Habbash (2015) memberikan pemaparan mengenai komite audit bukan menjadi penentu tingkat pengungkapan CSR. Anwar dan Fajari (2019) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial mampu secara positif mempengaruhi kualitas pengungkapan CSR, sedangkan disisi lain Wibawa (2014) menyajikan hasil sebaliknya yaitu CSR pada level pengungkapannya tidak mampu dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan manajerial.

Habbash (2015) mengkaji dampak pada kualitas CSR dengan meneliti 267 sampel perusahaan *go public non-financial* dengan rentang tahun 2007-2011 di negara Saudi Arabia dengan beberapa variabel antara lain pengaruh audit komite,

dewan komisaris independen, CEO *duality*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan institusi. Habbash pada penelitiannya menyajikan informasi mengenai kepemilikan pemerintah dan kepemilikan keluarga mampu secara positif mempengaruhi, dan pada variabel komite audit, dewan komisaris independen, *role duality*, dan kepemilikan institusional dinyatakan tidak mampu mempengaruhi CSR pada level pengungkapannya. Penelitian ini mengadopsi penelitian Habbash (2015) dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penulis mengangkat isu CSR dikarenakan ingin mengetahui sejauhmana kepedulian perusahaan sektor manufaktur di Indonesia terhadap lingkungan sekitar, dan penulis mengambil sampel perusahaan manufaktur dikarenakan kegiatan produksi dan eksplorasinya menimbulkan dampak yang negatif untuk lingkungan sekitar, dan lokasi beberapa perusahaan yang berada di pedalaman juga membuat perusahaan bertanggung jawab memajukan sumber daya di lingkungan sekitar.

Penelitian ini dilakukan di Indonesia sehingga memakai kaidah-kaidah terbitan GRI (2013) mengenai CSR yang menjadikannya berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Habbash (2015) yang penelitiannya memakai kaidah-kaidah dari *International Organization for Standardization* (ISO) yang dikeluarkan ISO 26000. Selain hal tersebut, penulis tidak menggunakan variabel CEO *duality* (rangkap jabatan antara CEO dan *chairman*) disebabkan oleh sistem Indonesia yang menerapkan sistem hukum kontinental Eropa yaitu *two-tiers board system* (sistem dua tingkat) seperti pada negara Belanda dan Jerman. Sistem ini menyatakan dengan jelas mengenai pemisahan peran dan tugas dewan komisaris dan dewan direksi. Pemisahan peran dalam hal ini dewan komisaris menjalankan fungsi *control*,

monitoring, dan menjadi supervisi pekerjaan dewan direksi, sedangkan dewan direksi menjalankan fungsi operasional dan mewakili perusahaan. (Setyawan, 2016).

Variabel komposisi kepemilikan asing ditambahkan penulis dalam penelitian ini karena perusahaan dengan investor asing dianggap memiliki budaya lebih baik serta *concern* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial karena dapat memberikan tekanan yang lebih kepada perusahaan untuk melakukan CSR, dan terdapat ketidakkonsistenan pada hasil pengujian variabel terhadap kualitas pengungkapan CSR. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH UKURAN KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diambil rumusan masalah yaitu “Bagaimana pengaruh elemen *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*” yang dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran Komite Audit mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR?
2. Apakah komposisi Dewan Komisaris Independen mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR?
3. Apakah komposisi Kepemilikan Pemerintah mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR?

4. Apakah komposisi Kepemilikan Institusional mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR?
5. Apakah komposisi Kepemilikan Keluarga mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR?
6. Apakah komposisi Kepemilikan Asing mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah Ukuran Komite Audit mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah Komposisi Dewan Komisaris Independen mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah Komposisi Kepemilikan Pemerintah mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah Komposisi Kepemilikan Institusional mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR.
5. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah Komposisi Kepemilikan Keluarga mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR.
6. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah Komposisi Kepemilikan Asing mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan yang bertujuan meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada, dalam hal ini ditujukan kepada regulator seperti OJK, IAI, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, dan sebagainya.
2. Memberikan masukan serta tambahan bahan pertimbangan pada proses pengambilan keputusan investasi kepada para investor perusahaan mengenai kemampuan *Good Corporate Governance* dalam pengaruhnya pada tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan sehubungan dengan penerapan CSR dalam operasional perusahaan dan pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan.
4. Memberikan tambahan referensi dan bahan pendukung penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan pengungkapan CSR.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas tentang pengertian dan konsep *corporate social responsibility*, telaah penelitian terdahulu, teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung penelitian yaitu teori legitimasi dan teori agensi, pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran. Elemen-elemen *good corporate governance* serta variabel yang digunakan dalam penelitian seperti ukuran komite audit, komposisi dewan komisaris independen, komposisi kepemilikan pemerintah, komposisi kepemilikan keluarga, komposisi kepemilikan institusional, dan komposisi kepemilikan asing juga akan dibahas pada bab ini.

2.1 *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*

2.1.1 *Pengertian dan Konsep Corporate Social Responsibility*

Menurut Bhattacharya dkk. (2009) dalam Setyawan (2016), CSR adalah konsepsi yang membahas mengenai urgensi entitas, perusahaan atau organisasi kebermanfaatan dari keharmonisan hubungan antara *social environment* dengan *stakeholders*. Program CSR jadi wujud tanggung jawab kepedulian sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap daerah atau wilayah sekitar dimana perusahaan itu berada. Kharismarsha (2018) menjelaskan bahwa penerapan CSR sebagai opsi strategi jangka panjang bagi bisnis perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham (*shareholder*), gaji karyawan, *product and services* kepada pelanggan, tapi serta memiliki komitmen sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat dan lingkungan karena CSR. Teori legitimasi

dirasa selaras dengan pernyataan diatas, yaitu legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan, menjamin kelangsungan hidup perusahaan (eksistensi perusahaan di lingkungan masyarakat), dan menjamin penerimaan kinerja perusahaan oleh masyarakat luas.

2.1.2 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah mekanisme suatu perusahaan atau organisasi secara sukarela dan terbuka untuk mengintegrasikan aktivitas kepedulian lingkungan dan sosial ke dalam kegiatan operasional dengan *stakeholders*, yang mengungguli tanggung jawab organisasi dibidang hukum (Pamu, 2015). Aspek *social, ethical, environmental* dan *sustainability* diungkapkan guna memperlihatkan sisi akuntabilitas perusahaan terhadap *stakeholders*.

Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 pada paragraf 9, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Aturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya menyajikan laporan keuangan melainkan mempresentasikan laporan penjabar yang berisi perihal aktivitas perusahaan terhadap lingkungan hidup. Disisi lain, tata cara serupa juga terdapat pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengeluarkan POJK no. 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang berisi aturan mengenai *sustainability report* yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Hasil yang beragam ditunjukkan pada penelitian-penelitian yang mendeskripsikan signifikansi *corporate governance* terhadap *social responsibility* pada level pengungkapannya.

Penelitian yang dilakukan Wibawa (2014) membahas pengaruh elemen *good corporate governance* pada kualitas pelaporan *corporate social responsibility* yang menggunakan sampel sebanyak 54 perusahaan yang listing di BEI tahun 2010 – 2012. Variabel yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan ukuran dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif, sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan Claudya (2015) membahas pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* yang menggunakan sampel sebanyak 97 perusahaan terdaftar dalam IDX tahun 2013. Variabel yang digunakan adalah kepemilikan publik, kepemilikan asing, dan dewan komisaris independen. Penelitian tersebut menghasilkan informasi yaitu komisaris independen mampu mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kualitas CSR.

Penelitian yang dilakukan Habbash (2015) pada 267 perusahaan *go public non financial* tahun 2007-2011 di negara Saudi Arabia yang meneliti dampak dari *corporate governance* terhadap *corporate social responsibility*. Habbash (2015) menggunakan variabel independen berupa *audit committee*, *board independent*, *role*

duality, government ownership, family ownership dan *institutional ownership*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *government ownership* dan *family ownership* mampu mempengaruhi secara positif, variabel *audit committee, board independent, role duality* dan *institutional ownership* dinyatakan tidak mempunyai pengaruh.

Penelitian yang dilakukan Setyawan (2016) meneliti dampak dari *good corporate governance* terhadap kualitas pengungkapan *corporate social responsibility* yang menggunakan sampel sebanyak 82 perusahaan sektor pertambangan yang *listing* di BEI tahun 2013 – 2014. Variabel yang digunakan adalah ukuran komite audit, komposisi kepemilikan asing, komposisi kepemilikan publik, kepemilikan keluarga, kepemilikan dewan komisaris independen, dan komposisi kepemilikan institusi. Penelitian tersebut menyatakan variabel dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan kepemilikan asing mampu mempengaruhi secara positif signifikan, kemudian kepemilikan keluarga, komposisi kepemilikan pemerintah, serta komposisi kepemilikan institusional dinyatakan tidak mempunyai pengaruh signifikan pada *corporate social responsibility disclosure*.

Penelitian yang dilakukan Siregar (2017) mengenai pengaruh *good corporate governance* dan kepemilikan saham publik terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* menggunakan sampel 76 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2014. Variabel yang digunakan adalah kepemilikan dewan komisaris independen, ukuran komite audit, komposisi kepemilikan institusi, komposisi kepemilikan asing, dan komposisi kepemilikan publik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komposisi kepemilikan asing dan ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan, komposisi kepemilikan publik berpengaruh

negatif, kemudian komposisi kepemilikan institusi dan kepemilikan dewan komisaris independen dinyatakan tidak memiliki dampak pada CSR.

Penelitian yang dilakukan Husaini dan Jayanti (2018) mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* menggunakan sampel 31 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2016. Variabel yang digunakan adalah komposisi kepemilikan institusional, independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas (ROA dan ROE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA, ROE, independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, serta kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama pada CSRD atau pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan Anwar dan Fajari (2019) mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap *environmental disclosure* menggunakan sampel 30 perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2017. Variabel yang digunakan adalah dewan direksi, proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Pengujian tersebut menghasilkan yakni dewan direksi dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh, kemudian kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Alat Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Wibawa (2014)	Regresi Berganda	Var. Independen: kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris. Var. Dependen: tingkat pengungkapan CSR	Variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif Variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
2.	Claudya (2015)	Regresi Berganda	Var. Independen:., kepemilikan asing, komisaris independen, dan kepemilikan publik. Var. Dependen: tingkat pengungkapan CSR	Variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan Variabel kepemilikan asing, kepemilikan publik asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
3.	Habbash (2015)		Var. Independen: <i>audit committee, board independent, role duality, government ownership, family ownership</i> dan <i>institutional ownership</i>	<i>Government ownership</i> dan <i>family ownership</i> berpengaruh positif <i>Audit committee, board independent, role duality</i> dan <i>institutional</i>

			Var. Dependen: CSR <i>disclosure</i>	<i>ownership</i> tidak berpengaruh.
4.	Setyawan (2016)	Regresi Berganda	<p>Var. Independen: ukuran komite audit, komposisi kepemilikan asing, komposisi kepemilikan publik, kepemilikan dewan komisaris independen, kepemilikan keluarga, dan komposisi kepemilikan institusi</p> <p>Var. Dependen: tingkat pengungkapan CSR</p>	<p>Variabel ukuran komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif</p> <p>Variabel komposisi kepemilikan keluarga, komposisi kepemilikan institusional, dan komposisi kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan</p>
5.	Siregar (2017)	Regresi Berganda	<p>Var. Independen: ukuran komite audit, komposisi kepemilikan asing, kepemilikan dewan komisaris independen, komposisi kepemilikan publik, dan komposisi kepemilikan institusi</p> <p>Var. Dependen: tingkat pengungkapan CSR</p>	<p>Variabel komposisi kepemilikan asing dan ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan</p> <p>Variabel komposisi kepemilikan publik berpengaruh negatif</p> <p>Variabel kepemilikan dewan komisaris independen dan komposisi kepemilikan institusi tidak berpengaruh.</p>

6.	Husaini dan Jayanti (2018)	Regresi Berganda	<p>Var. Independen: komposisi kepemilikan institusional, independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas (ROA dan ROE)</p> <p>Var. Dependen: tingkat pengungkapan CSR</p>	Variabel ROA, ROE, independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, serta kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama pada pengungkapan CSR.
7.	Anwar dan Fajari (2019)	Regresi Berganda	<p>Var. Independen: komite audit, dewan direksi, proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial</p> <p>Var. Dependen: <i>environmental disclosure</i></p>	<p>Variabel dewan direksi dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh</p> <p>Variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh positif.</p>

2.3 LANDASAN TEORI

2.3.1 Teori Legitimasi

Menurut Setyawan (2016), legitimasi masyarakat merupakan salah satu faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengekspansi perusahaan kedepan, menjamin kelangsungan hidup perusahaan (eksistensi perusahaan di lingkungan masyarakat). Teori legitimasi merupakan simbol psikologis keberpihakan yang dibutuhkan institusi-institusi agar mampu bersinergi dan dapat berinteraksi sosial serta aktivitasnya mampu memenuhi ekspektasi dari masyarakat luas. Perusahaan yang mampu melakukan dan menyelaraskan aktivitasnya dengan norma-norma yang

berlaku di masyarakat dapat terus bertahan menjalankan bisnisnya dan menghindari konflik (Ratmono & Sagala, 2015).

Achmad (2007) dalam Sungkar (2016) menyatakan bahwa suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi, antara lain:

1. Mencoba untuk mendidik *stakeholdernya* tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Mencoba untuk merubah persepsi *stakeholder* terhadap suatu kejadian (tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi).
3. Mengalihkan (memanipulasi) perhatian dari masalah yang menjadi perhatian (mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan - kegagalan).
4. Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya.

Teori ini telah menawarkan sudut pandang yang nyata mengenai pengungkapan sebuah perusahaan secara sukarela, berkelanjutan, dan bermasyarakat. Sehingga teori legitimasi telah menjadi salah satu teori yang paling sering digunakan terutama ketika berkaitan dengan aktivitas wilayah sosial dan akuntansi lingkungan.

2.3.2 Teori Agensi

Dalam teori ini dijelaskan hubungan keagenan yang didalamnya terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih yang mampu memberikan perintah atau pendelegasian beberapa otoritas dalam membuat keputusan kepada orang lain. Dalam hal ini pemegang saham atau investor adalah prinsipal, sedangkan manajemen yang mengelola perusahaan adalah agen (Claudya, 2015). Masalah agen-prinsipal antara

manajer dengan *shareholders* telah diprediksi oleh teori agensi, yakni kemungkinan peningkatan perilaku oportunistik timbul manakala manajer/pengelola perusahaan mempunyai hak terhadap sebagian ekuitas perusahaan. Pernyataan diatas diperkuat oleh pernyataan Anthony dan Govindarajan (2011) dalam Setyawan (2016) menyatakan bahwa dalam teori agensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen muncul ketika individu dalam aktivitasnya berorientasi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sesuai kesepakatan dalam kontrak kerja, *shareholder* selaku prinsipal melakukan pelimpahan wewenang atas *decision making* atau mandat agen (manajer) sebagai pihak yang memiliki lebih banyak informasi internal perihal pengelolaan perusahaan serta prospek masa depan perusahaan dibandingkan pemegang saham.

Teori agensi, perilaku *manager*, dan aktivitas CSR saling berhubungan dikarenakan menurut teori agensi, manajer memiliki kecenderungan bekerja dan berorientasi memenuhi keuntungan pribadi mereka, yakni salah satunya dengan meningkatkan profitabilitas perusahaan sehingga dikemudian hari diharapkan mendapat bonus atas prestasi dan pencapaian mereka. Untuk meningkatkan profitabilitas, manajer berpandangan bahwa aktivitas yang kurang memberikan dampak secara langsung dalam jangka waktu pendek terhadap profitabilitas harus ditinggalkan. Salah satu aktivitas yang tidak memberikan dampak signifikan dalam waktu singkat untuk keuntungan perusahaan menurut para manajer adalah investasi ke dalam aktivitas CSR (Rizky dan Yuyetta, 2015). Teori agensi berhubungan dengan pemilihan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan variabel independen yang dipilih merupakan bentuk kepemilikan saham (*shareholder*) atau investor perusahaan yang dalam teori agensi disebutkan sebagai prinsipal, dan

manajemen pengelola perusahaan yang melakukan kegiatan serta pengungkapan CSR disebutkan sebagai agen.

2.4 GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem atau tatanan yang mengendalikan dan mengolah perusahaan agar permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer dapat berkurang dan tercapainya tujuan perusahaan (Pamu, 2015). Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh KNKG menyebutkan bahwasanya ada keterkaitan antara GCG dengan tanggung jawab sosial perusahaan, dimana dapat memunculkan kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan yang dianggap sebagai salah satu sasaran pelaksanaan GCG oleh perusahaan.

Corporate governance memegang peranan penting dalam berjalannya aktivitas bisnis perusahaan, dengan *corporate governance* yang baik maka akan memberikan kepuasan dan peningkatan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan yang otomatis akan menumbuhkan citra baik oleh pihak eksternal terhadap aktivitas perusahaan. Kepercayaan yang diperoleh dari pasar diharapkan dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran dan kinerja perusahaan. KNKG menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus memastikan asas-asas GCG yaitu transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) wajib diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan agar tercapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan

memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berikut penjelasan 5 asas yang perlu dalam penerapan GCG (Pratama, 2013):

1. Transparansi (*Transparancy*)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang transparan, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan agar objektivitas aktivitas bisnis tetap terjaga.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dan berkelanjutan, akuntabilitas menjadi prasyarat penting. Perusahaan harus dikelola secara baik, benar, terukur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain agar dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga dapat terpelihara kesinambungan antara *sustainability* bisnis dengan tanggung jawab terhadap sosial masyarakat dan lingkungan.

4. Independensi (*Independency*)

Sebagai wujud pelaksanaan asas GCG, pengelolaan perusahaan secara independen wajib dilakukan agar bagian-bagian dari perusahaan tidak saling mendominasi dan pihak-pihak lain tidak dapat mengintervensi.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya harus senantiasa diperhatikan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya, yang hal tersebut didasarkan pada asas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam penelitian ini dipilih beberapa variabel independen yaitu ukuran komite audit, komposisi dewan komisaris independen, komposisi kepemilikan pemerintah, komposisi kepemilikan institusional, komposisi kepemilikan keluarga, dan komposisi kepemilikan asing yang digunakan untuk mewakili penerapan teori atau konsep *good corporate governance* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.4.1 Ukuran Komite Audit

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 55 tahun 2015, dewan komisaris membentuk sebuah komite audit yang memiliki *jobdesc* yaitu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan (Setyawan, 2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 55 tahun 2015 menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit minimal 3 anggota (diketuai salah satu komisaris independen), yang dimana salah satu anggotanya diwajibkan memiliki *background* di bidang akuntansi dan keuangan baik secara bekal keahlian maupun status pendidikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa komite audit perlu dijaga independensinya, untuk itu diterapkan aturan bahwa anggota tidak diizinkan memiliki saham (langsung atau tidak langsung) dan dalam

waktu 6 bulan terakhir bukan merupakan orang dalam atau penyedia jasa konsultasi hukum (kantor akuntan, konsultan hukum, jasa atestasi, dan jasa non-atestasi) pada perusahaan bersangkutan.

Dalam Pasal 10 Peraturan OJK no. 55 tahun 2015, Komite Audit secara umum memiliki tiga bidang pertanggungjawaban, yaitu (Liyanto & Anam, 2019):

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip transparansi (*transparency*). Komite audit dalam bidang ini bertanggung jawab berupa menjaga kualitas laporan keuangan agar tetap memberikan gambaran riil perusahaan (kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen jangka panjang).

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip tanggung jawab (*responsibility*). Komite audit dalam bidang ini bertanggung jawab berupa *monitoring* terhadap tata kelola perusahaan agar aktivitas dan perencanaannya tidak menyalahi undang-undang, aturan, dan etika yang berlaku serta pencegahan terhadap benturan kepentingan dan kecurangan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggung jawab ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip akuntabilitas (*accountability*). Komite audit dalam bidang ini bertanggung jawab berupa *controlling* pada potensi risiko pengendalian internal dan *monitoring* kinerja auditor internal.

2.4.2 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan dan bukan berasal dari pihak yang terafiliasi atau pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham, anggota direksi, dewan komisaris serta dengan perusahaan itu sendiri (Octamada, 2013). Kriteria dewan komisaris independen menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen;
2. Komisaris Independen tidak memiliki saham mayoritas, atau punya kekuasaan untuk berhubungan dengan pemilik saham mayoritas;
3. Komisaris Independen tidak memanfaatkan kedudukannya demi profit bisnis perusahaan dengan bertindak secara material.

Berdasarkan pemaparan informasi diatas, komisaris independen mampu menciptakan keseimbangan kepentingan berbagai pihak di setiap aktivitas perusahaan. Komisaris independen juga dapat mengontrol kecurangan dikarenakan sifatnya yang netral yaitu tidak berafiliasi bisnis dan kekeluargaan dengan pihak-pihak terkait. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, tugas dewan komisaris independen beberapa diantaranya adalah:

1. Menilai dan mengarahkan strategi kerja yang akan digunakan perusahaan, *controlling* pelaksanaan dan kinerja perusahaan, *monitoring* penggunaan modal perusahaan, strategi investasi dan penjualan aset. Ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip akuntabilitas (*accountability*) yaitu

upaya *balancing* kepentingan manajemen terkait dengan peran dan tanggung jawab.

2. Memonitor pelaksanaan *governance*, pengendalian risiko, penyusunan dan pelaporan anggaran tahunan serta mengadakan perubahan kebijakan dimana perlu. Tugas ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*).
3. Meninjau mekanisme keterbukaan arus komunikasi beserta efektivitasnya. Tugas dari komisaris independen ini merupakan bentuk pengembangan dari proses prinsip keterbukaan (*transparency*) yang bertujuan untuk menjamin tersedianya informasi yang terpercaya.

Dari penjelasan diatas asas-asas GCG telah dipenuhi oleh komisaris independen sehingga bisa dinyatakan masuk dalam mekanisme GCG, kemudian perannya mampu menanggulangi masalah benturan kepentingan yang timbul dari individu-individu di perusahaan seperti dalam teori agensi yang menyatakan yakni individu terlibat akan bekerja dan berorientasi pada tujuan pribadi atau kelompoknya yang berakibat munculnya konflik kepentingan (agen dan prinsipal).

2.4.3 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah atau *government ownership* adalah penggambaran otoritas atau dominasi pemerintah pada sebuah entitas. Pada level tertentu, direktur perusahaan mampu ditentukan oleh otoritas tersebut (Situmorang, 2017). Dominasi pemerintah mampu membuat program CSR yang dahulu sukarela kini menjadi implisit. Skema perusahaan melibatkan perusahaan dalam aktivitas CSR menjadi

trigger pengembangan reputasi, peningkatan profitabilitas, dan membuat kekhasan produk dibanding kompetitor.

Menurut Habbash (2015) kepemilikan pemerintah bisa mempertahankan tingkat keseimbangan antara dua tujuan, yang secara langsung dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan secara efektif dapat mempengaruhi karakter masyarakat. Selain itu, pemerintah mengatur dan teratur mengeluarkan peraturan yang melindungi masyarakat dan karena itu pemerintah bisa menjadi contoh yang baik dari mensponsori dan mematuhi peraturan tersebut melalui kepemilikan mereka di perusahaan. Disini dapat dilihat bahwa pemerintah dapat menyatukan antara tujuan manajemen dan tujuannya sendiri, yaitu antara mendapatkan keuntungan dan mensejahterakan masyarakat sekitar, dengan kata lain *agency problem* yang dijelaskan dalam teori agensi dapat diminimalisir oleh pemerintah.

2.4.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham entitas oleh institusi-institusi keuangan antara lain perusahaan asuransi, *asset management*, bank, dan dana pensiun. Kepemilikan institusional berfungsi sebagai pihak yang aktif mengawasi pengambilan keputusan. Kepemilikan institusional yang tinggi akan berbanding lurus pada tingkat pengawasan lebih besar dan membuat mereka lebih *protective*, sehingga dapat menghalangi serta memperkecil perilaku *opportunistic* manajer (Pamu, 2015).

Menurut Wiranata (2013) untuk mengurangi peluang tindak kecurangan atau bahkan dapat menghalangi perilaku *opportunistic* yang mungkin dilakukan manajer, maka perusahaan harus memiliki tingkat kepemilikan institusional yang baik

dikarenakan tingkat pengawasan oleh pihak investor berbanding lurus dengan tingkat kepemilikan saham institusional. Agar dapat memantau perkembangan investasi, institusi akan melakukan *monitoring* secara profesional dan mampu memproteksi perusahaan dari penyimpangan oleh manajemen yang mungkin terjadi, sehingga aktivitas perusahaan meningkat termasuk aktivitas CSR. *Agency problem* yang dijelaskan didalam teori agensi akan dapat diminimalisir dengan tekanan-tekanan yang diberikan kepada manajer.

2.4.5 Kepemilikan Keluarga

Menurut Halimah (2019), kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham oleh anggota keluarga yang mempunyai jabatan CEO dengan kepemilikan saham lebih dari 10%. Nama dewan direksi dan dewan komisaris dapat menjadi salah satu cara mengetahui kepemilikan keluarga. Apabila dewan direksi dan dewan komisaris condong pada satu atau beberapa nama, persisten beberapa tahun, serta menyandang status pemilik saham maka besar kemungkinan perusahaan tersebut tergolong perusahaan berkepemilikan keluarga. Wiranata (2013) mengungkapkan bahwa jika saham pengendali perusahaan tersebut adalah individu, maka bisa dikategorikan sebagai kepemilikan keluarga.

Perusahaan keluarga cenderung memiliki kinerja yang lebih unggul daripada perusahaan non keluarga karena anggota keluarga cenderung berkomitmen untuk mempertahankan reputasi serta keberlangsungan perusahaan agar dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, gambaran ini sesuai dengan apa yang dijelaskan di teori legitimasi yaitu perusahaan ingin mendapatkan legitimasi dari lingkungan sekitar agar keberlangsungan perusahaan terjamin. Dengan penjelasan diatas dapat

disimpulkan bahwa perusahaan dapat mendukung aktivitas CSR perusahaan berdasarkan tujuan dari kepemilikan keluarga yang ingin mendapatkan reputasi dan keberlangsungan perusahaan.

2.4.6 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah proporsi saham kepemilikan oleh perseorangan, pemerintah, badan hukum, ataupun entitas yang multinasional baik dari kewarganegaraan atau berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan *good corporate governance* dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Wiranata, 2013).

Menurut Wibowo (2013) dalam Siregar (2017), perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing cenderung memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan yang tidak. Hal ini disebabkan beberapa alasan. Pertama, perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih mengenal konsep pengungkapan CSR dan juga perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi. Kedua, kemungkinan permintaan aktivitas CSR yang lebih besar dari pihak eksternal (masyarakat) kepada perusahaan yang berlatar belakang asing. Ketiga, sistem informasi yang dimiliki perusahaan tersebut mungkin lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan informasi di internal dan kebutuhan informasi di perusahaan induk. Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya kepemilikan asing dalam pengungkapan CSR yang menggunakan pedoman GRI.

2.5 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.5.1 Ukuran Komite Audit

Komite audit di dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Salah satu bentuk pengawasan komite audit terhadap kinerja perusahaan adalah memastikan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan efektivitas audit dalam perusahaan, dan secara keseluruhan dapat mengendalikan aktivitas internal perusahaan (Utari, 2014).

Menurut Habbash (2015), pengungkapan CSR berkualitas tinggi menjadi cerminan pengambilan kebijakan oleh manajer menyangkut tanggung jawab dan aktivitas sosial bisnis dapat sukses dan efektif diawasi oleh kinerja komite audit. Hapsoro (2012) dalam Sungkar (2016) menyatakan bahwa besaran ukuran komite audit akan berpengaruh signifikan pada pelaksanaan pengawasan, ketika semakin besar maka akan semakin efektif sehingga *agency problem* dapat diminimalisir. Maka dinyatakan ukuran komite audit berbanding lurus dengan aktivitas perusahaan untuk mengikuti peraturan, termasuk aktivitas-aktivitas pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.5.2 Komposisi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham

pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (Nugroho & Yulianto, 2015). Keberadaan komisaris independen akan menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, menjaga “*fairness*” saat pengambilan keputusan, menstabilkan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, dan bahkan kepentingan para stakeholders lainnya (Wibawa, 2014).

Agar kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan lebih sedikit dan tata kelola perusahaan lebih baik, maka keberadaan komisaris independen sangat dibutuhkan. Selain itu, komisaris independen diharapkan mampu membentengi perusahaan dari pihak yang bermaksud tidak baik, menjamin keefektifan pengawasan perusahaan secara prosedural dan mekanisme serta sesuai dengan perundang-undangan negara (Pratama, 2013). Dengan demikian semakin banyak komisaris independen perusahaan dapat mempengaruhi pengawasan aktivitas CSR karena prinsip keseimbangan kepentingan berbagai pihak akan selalu dimaksimalkan oleh komisaris independen termasuk pemaksimalan kegiatan CSR. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.5.3 Komposisi Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan saham pemerintah memberi dampak baik yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi lebih besar, dikarenakan pemerintah harus mencitrakan budaya transparansi perusahaan publik. Selain itu, pemerintah mengatur dan teratur mengeluarkan peraturan yang melindungi masyarakat dan karena itu

pemerintah bisa menjadi contoh yang baik dari mensponsori dan mematuhi peraturan tersebut melalui kepemilikan mereka di perusahaan (Nugroho, 2011).

Rizky dan Yuyetta (2015) mengungkapkan bahwa kepemilikan saham oleh pemerintah berdampak pada sifat perusahaan yang akan lebih sensitif secara politik karena mereka merasa aktivitas organisasinya lebih diperhatikan oleh publik. Dengan demikian, perusahaan sebagai badan yang dipercaya oleh publik dapat melegitimasi keberadaan mereka melalui kegiatan sosial yang lebih bertanggung jawab dan pengungkapannya. Pemerintah dapat menyatukan tujuan manajemen untuk mendapatkan keuntungan dan tujuannya sendiri dengan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, dengan kata lain pemerintah dapat meminimalisir *agency problem* yang dijelaskan dalam teori agensi. Tekanan pemerintah dan status pemerintah sebagai regulator membuat pemerintah dengan gencar berupaya untuk melaksanakan aktivitas CSR dan mengungkapkannya dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Komposisi kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.5.4 Komposisi Kepemilikan Institusional

Wibawa (2014) memaparkan bahwa salah satu cara untuk memonitor kinerja manajer dalam mengelola perusahaan dan dapat mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer adalah melalui kepemilikan institusional. Keberadaan saham dari institusi diharapkan mampu menaikkan output pada aktivitas perusahaan

termasuk CSR pada level pengungkapannya. Hal-hal tersebut dapat dicapai melalui pengawasan agar integritas manajemen terjaga dan membuat *agency problem* yang dijelaskan didalam teori agensi akan dapat diminimalisir.

Kepemilikan institusional sebagai mekanisme dalam *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas keputusan investasi dalam tanggung jawab social, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Sari, 2013). Suatu perusahaan yang terdapat kepemilikan institusional didalamnya akan mampu mendorong peningkatan pengawasan kinerja manajemen sampai ke titik optimal karena baik buruknya manajemen akan bisa dipengaruhi oleh institusi yang mewakili suatu sumber kekuasaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Komposisi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.5.5 Komposisi Kepemilikan Keluarga

Haniffa dan Cooke (2005) dalam Setyawan (2016) menemukan bahwa perusahaan keluarga cenderung mengungkapkan informasi secara sukarela. Perusahaan keluarga bisa mendapatkan beberapa manfaat sosial dari saham mereka di perusahaan-perusahaan selain keuntungan finansial, seperti membangun citra sosial yang kuat, prestise, reputasi yang baik dan posisi sosial bagi keluarga mereka. Menurut Yudastio (2016), perusahaan milik keluarga tergolong peduli *going concern* pada bisnis perusahaan. Posisi strategis perusahaan yang apabila ditempati oleh salah

satu bagian dari keluarga maka akan menjadi pemicu atau *trigger* pada tumbuhnya dedikasi, rasa memiliki, dan usaha berbuat baik oleh manajerial kepada perusahaan.

Setyawan (2016) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi dan pemilihan strategi bisnis yang tepat akan meningkatkan kinerja perusahaan. Pemaparan tersebut yang melandasi penulis untuk beranggapan bahwa dampak positif akan timbul dan berujung pada kinerja baik dan keberlangsungan perusahaan. Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat mendukung aktivitas CSR perusahaan berdasarkan tujuan dari kepemilikan keluarga yang ingin mendapatkan reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Komposisi kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.5.6 Komposisi Kepemilikan Asing

Keberadaan pihak asing dalam pemegang saham perusahaan di Indonesia membuat perusahaan harus luas dalam mengungkapkan informasinya. Hal ini disebabkan budaya persaingan perusahaan diluar negeri yang bersaing ketat dan berusaha mencari stigma baik dalam aktivitas operasionalnya. Pada keberlanjutannya, pihak asing membawa budaya tersebut dan mencoba menerapkannya pada setiap tempat yang ingin mereka jadikan pusat investasi. Melalui *environmental disclosure*, publik dapat melihat bahwa aktivitas operasi perusahaan selalu berkesinambungan

dengan pengelolaan pelestarian lingkungan dan memperlihatkan kepedulian perusahaan pada masyarakat sekitar (Kharismarsha, 2018).

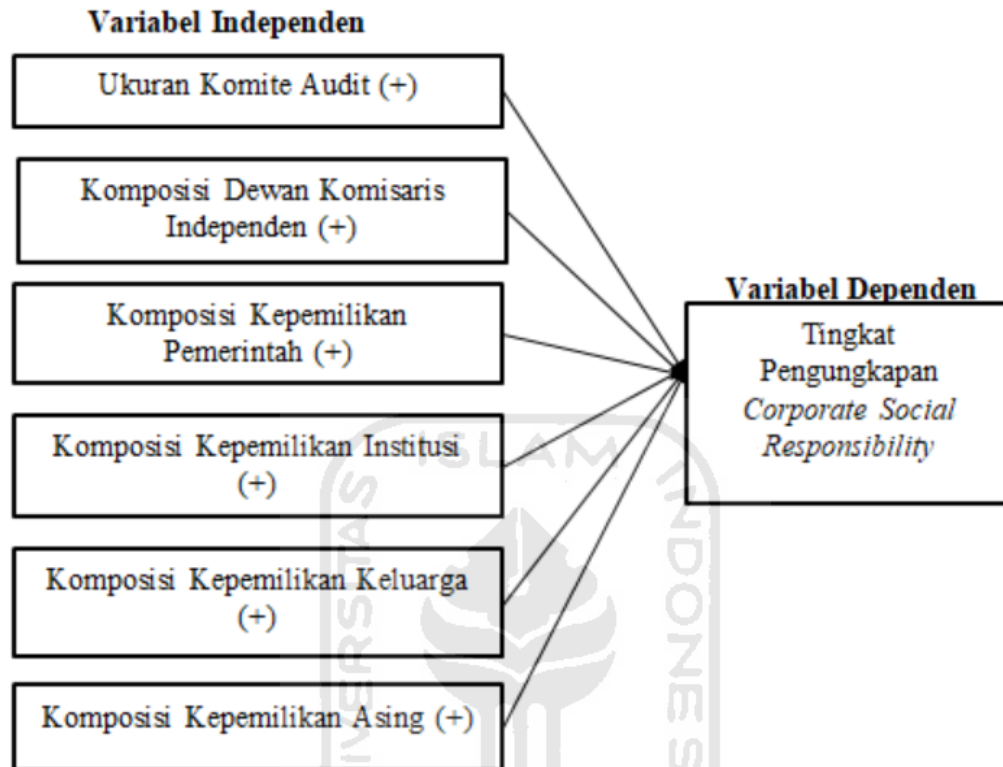
Claudia (2015) menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham asing dianggap lebih *concern* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Keahlian dalam sistem informasi dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi menjadi indikator otoritas asing tergolong dalam salah satu asas mekanisme GCG, yaitu mampu meredam *agency cost*, sebab dalam setiap aktivitas perusahaan pemilik asing bisa bijaksana dalam rangka penyelarasan tujuan dengan manajer. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham oleh pihak asing memilih menggunakan pengungkapan aktivitas CSR sebagai salah satu sarana untuk mempresentasikan interes perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan melalui sikap dan tanggung jawabnya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Komposisi kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.6 KERANGKA PEMIKIRAN

Indikasi yang memperlihatkan perusahaan memiliki *corporate governance* yang baik, maka hak dan perlakuan adil akan didapatkan oleh seluruh dari pemegang saham. Maka rancangan pengujian hipotesis yang didasarkan pada kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas beberapa hal diantaranya mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel (dependen dan independen), dan metode analisis data.

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasinya ialah perusahaan-perusahaan yang membidangi sektor manufaktur yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rentang waktu 2016 sampai 2018 yang diketahui berjumlah 438 perusahaan. Metode *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini yakni dalam pemilihan sampel akan menggunakan beberapa pertimbangan beserta kriteria tertentu. Sampel yang diperoleh sesuai kriteria sebanyak 372 perusahaan. Kriteria dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah:

1. Perusahaan *listing* di BEI di tahun 2016 sampai 2018.
2. Ketersediaan akses laporan tahunan perusahaan dan terdapat informasi tanggung jawab sosial (CSR).
3. Ketersediaannya data mengenai ukuran komite audit, komposisi dewan komisaris independen, komposisi kepemilikan pemerintah, komposisi kepemilikan institusional, komposisi kepemilikan keluarga, komposisi kepemilikan asing pada perusahaan dan maupun informasi pendukung variabel-variabel penelitian.

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

Menurut Azwar (2013:91) bahwa data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggerakkan alat pengukuran atau pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari, seperti observasi langsung sehingga lebih akurat dan lebih rinci, akan tetapi seringkali tidak efisien karena memperolehnya diperlukan sumber data yang lebih besar. Sedangkan data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berbentuk dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia dan bisa diakses umum, sehingga lebih efisien akan tetapi terkadang kurang akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder didapat dari laporan tahunan perusahaan tahun 2016 sampai 2018 yang dipublikasikan untuk umum dan diperoleh dari masing-masing situs resmi perusahaan, situs resmi BEI dan *Indonesian Capital Market Electronic Library*.

3.3 DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Definisi operasional adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif apabila indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Definisi operasional dilakukan dengan tujuan untuk operasionalisasi variabel yang mengarahkan pada pemilihan alat ukur maupun penyusunan alat ukur yang sesuai dengan tujuan penelitian (Azwar, 2013:74).

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) ialah yang keberadaannya timbul sebagai dampak langsung dari perubahan, manipulasi, dan pengaruh dari variabel independen (Chandrasari, 2016). Dalam penelitian ini memakai tingkat pengungkapan CSR sebagai variabel dependen yang informasinya terdapat pada laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan CSR dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) yang mengacu pada indikator *Global Reporting Initiatives* tahun 2013. Terdapat 7 fokus pengungkapan yang terdapat dalam indikator GRI, yaitu *economic, environment, social, labour practices and decent work, human rights, society, dan product responsibility* yang kemudian menjadi dasar dalam *sustainability reporting*. Berdasarkan anggapan semua item akan diungkapkan oleh perusahaan, maka akan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CSRDi} = \frac{n}{k}$$

keterangan:

CSRDi = indeks pengungkapan CSR

n = jumlah item pengungkapan yang dipenuhi

k = jumlah semua item yang mungkin dipenuhi

Variabel ini diukur dengan cara *data checklist* yakni melakukan pengamatan terhadap laporan tahunan, apabila dalam laporan keuangan terdapat item informasi yang ditentukan maka diberi skor 1, sebaliknya apabila dalam laporan keuangan tersebut tidak terdapat item informasi yang ditentukan maka diberi skor 0.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah suatu variabel yang menjelaskan atau mampu mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat 6 variabel independen yaitu:

3.3.2.1 Ukuran Komite Audit

Indikator dari Ukuran Komite Audit dapat terlihat melalui banyaknya anggota komite audit di sebuah organisasi, entitas, atau perusahaan. Variabel ini dapat diketahui melalui informasi yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan dan pengukurannya menggunakan skala nominal (Nugroho & Yulianto, 2018).

3.3.2.2 Komposisi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak berafiliasi dengan pihak-pihak terkait (manajemen, pejabat, dll) atau upaya lain berhubungan dengan pemilik mayoritas saham dari suatu entitas. Jumlah komisaris independen dapat diketahui dengan cara membagi antara banyaknya komisaris independen dengan banyaknya anggota dewan komisaris (Wardani dan Haryani, 2018).

$$\text{Komposisi Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{anggota dewan komisaris independen}}{\text{anggota dewan komisaris}}$$

3.3.2.3 Komposisi Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah dalam suatu perusahaan. Variabel komposisi kepemilikan pemerintah ini diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan mengetahui persentase jumlah saham pemerintah dengan jumlah saham yang beredar (Farida & Abdullah, 2019).

$$\text{Komposisi Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{jumlah saham pemerintah}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

3.3.2.4 Komposisi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dalam suatu perusahaan. Variabel komposisi kepemilikan institusi ini diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan rasio atau persentase jumlah saham institusi dengan jumlah saham yang beredar (Sungkar, 2016).

$$\text{Komposisi Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

3.3.2.5 Komposisi Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga adalah jumlah saham yang dimiliki keluarga dalam suatu perusahaan. Variabel komposisi kepemilikan keluarga ini diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan rasio atau persentase jumlah saham keluarga dengan jumlah saham yang beredar (Wiranata dan Nugrahanti, 2013 dalam Setyawan, 2016).

$$\text{Komposisi Kepemilikan Keluarga} = \frac{\text{jumlah saham keluarga}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

3.3.2.6 Komposisi Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor asing, perorangan maupun lembaga. Kepemilikan asing diukur dari presentase saham yang dimiliki oleh pihak asing dengan jumlah saham yang diterbitkan (Kharismarsha, 2018).

$$\text{Komposisi Kepemilikan Asing} = \frac{\text{jumlah saham asing}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi sebagai mekanisme pengumpulan data yang dimana data-data sekunder, dokumentasi, dan seluruh

informasi pendukung akan dikumpulkan dan digunakan sebagai sarana penyelesaian masalah yang ada dalam dokumen.

3.5 METODE ANALISIS DATA

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2013) statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran data dalam penelitian yang terlihat dari informasi nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, *range*, *sum*, standar deviasi, varian, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Persebaran data yang ada dapat diketahui dengan melihat standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Data yang memiliki standar deviasi yang besar maka dapat digambarkan bahwa data tersebut menyebar, sebaliknya ketika data yang memiliki standar deviasi yang kecil maka dapat digambarkan bahwa data tersebut berkumpul. Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran variabel yang bersifat metrik.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Munsaidah dkk. (2016), uji asumsi klasik adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana model regresi layak digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa pengujian, antara lain uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang pengujian-pengujian tersebut dilakukan untuk menghindari biasnya estimasi yang terjadi, mengingat tidak pada semua data regresi dapat diterapkan.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas berfungsi untuk menganalisis penyimpangan dalam variabel pengganggu atau residual dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak (Yuliansyah dkk., 2018). Ghozali (2013) menyatakan bahwa analisis grafik dan uji statistik dapat menjadi cara untuk mendeteksi distribusi residual dalam uji normalitas. Grafik *normal probability plot* dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* digunakan sebagai media pengujian dalam penelitian ini. Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik *normal probability plot* adalah dengan melihat penyebaran titik di sekitar garis diagonal dan sifatnya terhadap garis diagonal, apabila mengumpul di sekitar garis dan mengikuti arah garis maka dapat disebut memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya ketika titik menyebar jauh dari garis dan tidak mengikuti arah garis, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk uji *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat nilai *asympt. sig. (2-tailed)*. Jika probabilitas $> 0,05$ maka data terdistribusi normal, berlaku sebaliknya ketika probabilitas $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2013).

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya atau tidaknya korelasi variabel-variabel independen didalam sebuah model regresi (Ghozali, 2013). Multikolineritas dapat dideteksi melalui pengamatan nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan *variance inflation factor (VIF)* > 10 ($VIF=1/tolerance$). Kedua indikasi tersebut menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel

independen lainnya, dimana model regresi yang baik adalah ketika antar variabel independen tidak ditemukan korelasi.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Model regresi yang dapat dinyatakan baik adalah ketika konsisten atau tetapnya *variance* dari tiap pengamatan yang dilakukan, atau dinamakan homoskedastisitas. Keberadaan heteroskedastisitas di uji dengan grafik *scatterplot* yang indikasinya melalui pengamatan terhadap pola yang dihasilkan dan juga dengan melihat ZPRED (nilai prediksi variabel dependen) dengan SRESID (nilai residual). Ketika didalam grafik terdapat pola teratur (bergelombang, garis, dan melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, ketika tidak ada pola terbentuk, serta tersebar titik-titik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (vertikal), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi variabel di dalam suatu model regresi linier dengan perubahan waktu yang terjadi. Autokorelasi menjadi sering ditemukan pada data runut waktu (*time series*) dikarenakan observasi dilakukan berurutan sepanjang waktu, saling berkaitan satu sama lain, dan kemudian memunculkan residual (kesalahan pengganggu) dari setiap observasi yang dilakukan (Yuliansyah dkk., 2017). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi, salah satunya menggunakan uji Durbin-Watson (*D-W test*). Uji Durbin Watson mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada

autokorelasi lagi diantara variabel bebas, yang ditunjukkan dengan nilai D-W ada diantara nilai du dan 4-du.

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Metode regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model yang diajukan penulis dengan menggunakan software SPSS untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, yang pada penelitian ini dapat dituliskan dan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Indeks pengungkapan CSR perusahaan i
X ₁	= Ukuran Komite Audit
X ₂	= Komposisi Dewan Komisaris Independen
X ₃	= Komposisi Kepemilikan Pemerintah
X ₄	= Komposisi Kepemilikan Institusional
X ₅	= Komposisi Kepemilikan Keluarga
X ₆	= Komposisi Kepemilikan Asing
ε	= <i>error term</i>

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Dalam uji statistik terdapat dua jenis alat uji, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal, sedangkan statistik non parametrik digunakan jika data yang digunakan bersifat tidak normal. Penulis dalam hal ini menggunakan pengujian statistik parametrik.

Ghozali (2013) menyatakan agar statistik parametrik dapat digunakan, maka terdapat beberapa kondisi yang mendasar yang harus terpenuhi, antara lain observasi yang berjalan harus memiliki tingkat independensi yang baik, populasi asal harus berdistribusi normal, variabel-variabel yang ada harus diukur setidaknya dengan skala interval, serta *variance* populasi masing-masing grup dalam hal analisis dengan dua grup harus sama. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik. Untuk menguji hipotesis yang diajukan penulis, maka akan dilakukan uji pengaruh simultan (*F test*), uji koefisien determinasi (*adjusted R²*), dan uji pengaruh parsial (*t test*).

3.5.4.1 Hipotesis Operasional

3.5.4.1.1 Ukuran Komite Audit

$H_{01} : \beta_1 \leq 0$: Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*

$H_{a1} : \beta_1 > 0$: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*

3.5.4.1.2 Komposisi Dewan Komisaris Independen

$H_{02} : \beta_2 \leq 0$: Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*

$H_{a2} : \beta_2 > 0$: Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*

3.5.4.1.3 Komposisi Kepemilikan Pemerintah

$H_{03} : \beta_3 \leq 0$: Komposisi Kepemilikan Pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*

$H_{a3} : \beta_3 > 0$: Komposisi Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*

3.5.4.1.4 Komposisi Kepemilikan Institusional

$H_{04} : \beta_4 \leq 0$: Komposisi Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*

$H_{a4} : \beta_4 > 0$: Komposisi Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*

3.5.4.1.5 Komposisi Kepemilikan Keluarga

$H_{05} : \beta_5 \leq 0$: Komposisi Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*

$H_{a5} : \beta_5 > 0$: Komposisi Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*

3.5.4.1.6 Komposisi Kepemilikan Asing

$H_{06}: \beta_6 \leq 0$: Komposisi Kepemilikan Asing tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*

$H_{a6}: \beta_6 > 0$: Komposisi Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*

3.5.5 Uji Adjusted R Squared (Adj. R²)

Nilai R² digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan *adjusted R²* berkisar antara 0 dan 1 dikarenakan R² mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Ketika *adjusted R²* mendekati 1, maka kemampuan model menjelaskan variabel dependen akan semakin baik.

3.5.6 Uji Parsial (t test)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji besaran pengaruh variabel penjelas/independen terhadap variasi variabel dependen. Hipotesis dapat diterima ataupun ditolak dapat dilihat menggunakan *significance level* 0.05 ($\alpha = 5\%$) dan kriteria lain yaitu nilai signifikansi t. Apabila < 0.05 maka H_a ditolak dan dapat disimpulkan bahwa satu variabel independen akan mempunyai pengaruh yang signifikan atas variabel dependen, berlaku juga ketika > 0.05 maka H_a diterima dan dapat disimpulkan bahwa satu variabel independen terhadap variabel dependen tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dilakukan penjabaran data perusahaan-perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 hingga 2018. Pada bab ini dijelaskan hasil analisa dari variabel-variabel independen yang ada dan pengaruhnya terhadap variabel dependen.

4.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang membidangi sektor manufaktur yang *listing* dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) rentang waktu 2016 sampai 2018 teridentifikasi sejumlah 438 perusahaan. Metode *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini yakni dalam pemilihan sampel akan menggunakan beberapa pertimbangan beserta kriteria tertentu. Sampel yang diperoleh sesuai kriteria sebanyak 372 perusahaan.

Tabel 4. 1

Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI di tahun 2016 sampai 2018	146
2	Perusahaan yang tidak memiliki ketersediaan akses laporan tahunan perusahaan.	(22)
3	Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial.	(0)
4	Perusahaan yang tidak memiliki informasi atau ketersediaan data yang akan digunakan dalam penelitian	(0)
	Jumlah sampel penelitian yang memenuhi kriteria	124

4.2 ANALISIS DESKRIPTIF

Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran data dalam penelitian yang terlihat dari informasi nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, *range*, *sum*, standar deviasi, varian, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Persebaran data yang ada dapat diketahui dengan melihat standar deviasi, rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Hasil pengujian ini dapat dilihat melalui tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4. 2

Hasil Analisis Deskriptif

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std, Deviation
CSR	372	0,01	0,48	0,1772	0,08926
UKA	372	2,00	6,00	3,0538	0,35564
DKI	372	0,20	0,67	0,3903	0,08657
KP	372	0,00	0,90	0,0259	0,13559
INST	372	0,00	0,99	0,6364	0,26372
FAM	372	0,00	0,89	0,0883	0,19870
ASING	372	0,00	0,99	0,2686	0,33583
Valid N (listwise)	372				

Sumber : Data output SPSS diolah 2020

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel di atas ialah sebagai berikut:

1. Nilai minimum pengungkapan CSR adalah sebesar 0,01 yang diperoleh PT Surya Toto Indonesia Tbk sedangkan nilai maksimum pengungkapan CSR adalah sebesar 0,48 yang diperoleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nilai rata-rata pengungkapan CSR adalah sebesar 0,1772 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,08926. Dapat dinyatakan level perusahaan di Indonesia ketika melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebesar 17,72%. Nilai rata-rata tersebut

diatas dari standar deviasinya, sehingga ditarik kesimpulan yakni data pengungkapan CSR bersifat homogen.

2. Nilai minimum komite audit adalah sebesar 2 yang diperoleh PT Martina Berto Tbk, disisi lain nilai maksimum komite audit adalah sebesar 6 yang diperoleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nilai rata-rata pengungkapan komite audit adalah sebesar 3,0538 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,3556. Dapat dinyatakan bahwa jumlah anggota komite audit perusahaan di Indonesia adalah sebanyak 3 orang. Nilai rata-rata tersebut diatas dari standar deviasinya, sehingga ditarik kesimpulan yakni data pengungkapan ukuran komite audit bersifat homogen.
3. Nilai minimum dewan komisaris independen adalah sebesar 0,20 yang diperoleh PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan PT Kimia Farma Tbk. Nilai tersebut mencatatkan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan PT Kimia Farma Tbk sebagai perusahaan dengan dewan komisaris independen terendah, disisi lain nilai maksimum dewan komisaris independen adalah sebesar 0,67 yang diperoleh PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk. Nilai tersebut mencatatkan PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk pada perusahaan dengan dewan komisaris independen tertinggi. Nilai rata-rata dewan komisaris independen adalah sebesar 0,3903 dengan standar deviasi sebesar 0,08657. Dapat dinyatakan bahwa tingkat proporsi dewan komisaris independen terhadap dewan komisaris senilai 39,03%. Nilai tersebut diatas standar deviasinya, sehingga ditarik kesimpulan yakni data dewan komisaris independen bersifat homogen.
4. Nilai minimum kepemilikan pemerintah adalah sebesar 0,00 yang berarti perusahaan tersebut tidak memiliki kepemilikan pemerintah, disisi lain nilai maksimum kepemilikan pemerintah adalah sebesar 0,90 yang diperoleh PT Kimia

Farma Tbk. Nilai tersebut mencatatkan PT Kimia Farma Tbk sebagai perusahaan dengan kepemilikan pemerintah tertinggi. Nilai rata-rata kepemilikan pemerintah adalah sebesar 0,0259 dengan standar deviasi sebesar 0,13559. Dapat dinyatakan bahwa tingkat kepemilikan saham yang dimiliki pihak pemerintah adalah sebesar 2,59%. Nilai tersebut dibawah standar deviasinya, sehingga ditarik kesimpulan yakni data kepemilikan pemerintah bersifat heterogen.

5. Nilai minimum kepemilikan institusional adalah sebesar 0,00 yang berarti perusahaan tersebut tidak memiliki kepemilikan institusional, disisi lain nilai maksimum kepemilikan institusional adalah sebesar 0,99 yang diperoleh PT Bentoel Investama Tbk. Nilai tersebut mencatatkan PT Bentoel Investama Tbk sebagai perusahaan dengan kepemilikan institusional tertinggi diantara sampel. Nilai rata-rata kepemilikan institusional adalah sebesar 0,6364 dengan standar deviasi sebesar 0,26372. Dapat diartikan bahwa tingkat kepemilikan saham yang dimiliki pihak institusi adalah sebesar 63,64%. Nilai rata-rata tersebut dibawah nilai standar deviasinya, sehingga ditarik kesimpulan yakni data kepemilikan institusional bersifat heterogen.
6. Nilai minimum kepemilikan keluarga adalah sebesar 0,00 yang berarti perusahaan tersebut tidak memiliki kepemilikan keluarga, disisi lain nilai maksimum kepemilikan keluarga adalah sebesar 0,89 yang diperoleh PT Beton Jaya Manunggal Tbk. Nilai tersebut mencatatkan PT Beton Jaya Manunggal Tbk sebagai perusahaan dengan kepemilikan keluarga tertinggi. Nilai rata-rata kepemilikan keluarga adalah sebesar 0,0883 dengan standar deviasi sebesar 0,1987. Dapat diartikan bahwa tingkat kepemilikan saham yang dimiliki pihak keluarga adalah sebesar 8,83%. Nilai rata-rata tersebut dibawah dari standar

deviasinya, sehingga ditarik kesimpulan yakni data kepemilikan institusional bersifat heterogen.

7. Nilai minimum kepemilikan asing adalah sebesar 0,00 yang berarti perusahaan tersebut tidak memiliki kepemilikan asing, disisi lain nilai maksimum kepemilikan asing adalah sebesar 0,99 yang diperoleh PT Bentoel Investama Tbk. Nilai tersebut mencatatkan PT Bentoel Investama Tbk sebagai perusahaan dengan kepemilikan asing tertinggi. Nilai rata-rata kepemilikan asing adalah sebesar 0,2686 dengan standar deviasi sebesar 0,33583. Dapat diartikan bahwa tingkat kepemilikan saham yang dimiliki pihak asing adalah sebesar 26,86%. Nilai rata-rata tersebut diatas nilai standar deviasinya, sehingga ditarik kesimpulan yakni data kepemilikan asing bersifat homogen.

4.3 Uji ASUMSI KLASIK

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi menganalisis variabel pengganggu atau residual dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak, yang pembuktiannya menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*, mengacu pada nilai *asympt. sig. (2-tailed)*. Jika probabilitas $> 0,05$ maka data terdistribusi normal, berlaku kebalikan ketika probabilitas $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4. 3

Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

	Unstandardized Residual
n	372
Kolmogorov-Smirnov Z	1,200
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,112

Sumber : Data output SPSS diolah 2020

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* dihasilkan nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,112 yang menyatakan bahwa normalnya distribusi data residual.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya korelasi antara variabel independen yang digunakan. Ghozali (2013) memberi pernyataan bahwa nilai VIF dan *tolerance* pada tiap variabel dapat dijadikan acuan dalam identifikasi multikolinieritas. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.4 ini:

Tabel 4. 4

Hasil Uji Multikolinieritas

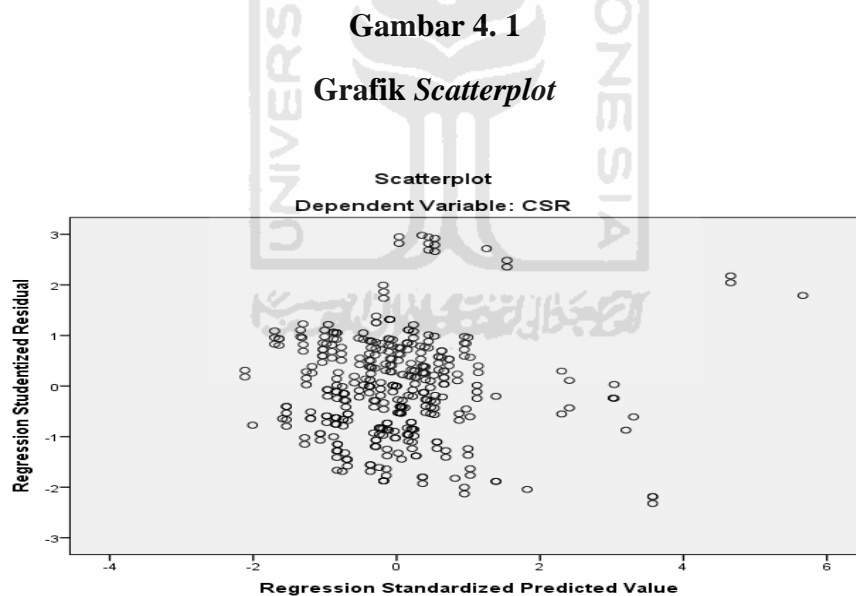
Variabel Independen	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
UKA	0,825	1,212	Tidak ada multikolinieritas
DKI	0,919	1,088	Tidak ada multikolinieritas
Pemerintah	0,742	1,347	Tidak ada multikolinieritas
INST	0,381	2,624	Tidak ada multikolinieritas
Keluarga	0,435	2,296	Tidak ada multikolinieritas
Asing	0,837	1,195	Tidak ada multikolinieritas

Sumber : Data output SPSS diolah 2020

Bersumber pada tabel di atas, didapati hasil bahwa variabel independen yang dipakai pada penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0.1 dan memiliki nilai VIF < 10 yang dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terdapat korelasi yang kuat.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi ketidaksamaan *variance* yang berasal dari residual antara pengamatan satu ke pengamatan yang lain dalam sebuah model regresi. Menurut Ghozali (2013), grafik *scatterplot* dapat dijadikan metode identifikasi heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini:



Dari hasil analisis di atas, didapati hasil sebaran data yang baik dan data yang ada tidak membentuk sebuah pola tertentu sehingga dapat dinyatakan pada model regresi tersebut tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi variabel di dalam suatu model regresi linier dengan perubahan waktu yang terjadi. Autokorelasi kadang kala ditemukan pada data *time series* (runut waktu) dikarenakan observasi dilakukan berurutan sepanjang waktu, saling berkaitan satu sama lain, dan kemudian memunculkan residual (kesalahan pengganggu) dari setiap observasi yang dilakukan. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi, salah satunya adalah dengan uji *Durbin-Watson* (D-W test). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4. 5
Hasil Uji Autokorelasi

Keterangan	Nilai
Durbin-Watson	1,864

Sumber : Data output SPSS diolah 2020

Berdasar analisis uji autokorelasi diatas dapat dilihat nilai DW hitung yaitu 1,864. Selanjutnya mencari d_L dan d_U , dari jumlah sampel 372 dan jumlah variabel 6 maka didapat $d_L = 1,802$ dan $d_U = 1,856$. Mendeteksi autokorelasi positif yaitu jika $d < d_L$ maka terdapat autokorelasi positif, jika $d > d_U$ maka tidak terdapat autokorelasi positif, jika $d_L < d < d_U$ maka pengujian tidak dapat disimpulkan. Mendeteksi autokorelasi negatif jika $(4-d) < d_L$ maka terdapat autokorelasi negatif, jika $(4-d) > d_U$ maka tidak terdapat autokorelasi negatif, jika $d_L < (4-d) < d_U$ maka pengujian tidak dapat disimpulkan. Maka kesimpulannya $d_U < d < 4-d_U$ ($1,856 < 1,864 < 3,144$) tidak terdapat autokorelasi.

4.4 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Analisis regresi linier berganda berfungsi agar besaran pengaruh variabel independen terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2018 dapat diketahui. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4. 6
Hasil Uji t (t-Test)

Variabel Independen	Koefisien regresi	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,067	,171	
UKA	0,028	,040	H1 didukung
DKI	0,122	,023	H2 didukung
KP	0,089	,019	H3 didukung
INST	-0,047	,087	H4 tidak didukung
FAM	-0,081	,016	H5 tidak didukung
Asing	0,043	,003	H6 didukung
Adjusted R Square	0,090		
Fhitung	7,097		
Sig F	0,000		

Sumber : Data sekunder diolah 2020

Keterangan:

- UKA = Ukuran Komite Audit
- DKI = Dewan Komisaris Independen
- KP = Komposisi Kepemilikan Pemerintah
- INST = Komposisi Kepemilikan Institusional

- FAM = Komposisi Kepemilikan Keluarga
- Asing = Komposisi Kepemilikan Asing

Model persamaan regresi yang dikembangkan bersumber dari hasil analisis regresi linier berganda di atas ialah sebagai berikut:

$$\text{CSR} = 0,067 + 0,028\text{UKA} + 0,122\text{DKI} + 0,089\text{KP} - 0,047\text{INST} - 0,081\text{FAM} + 0,043\text{Asing}$$

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil model persamaan regresi di atas ialah sebagai berikut:

1. Nilai intercept konstanta 0,067, dapat ditarik kesimpulan yakni ketika nilai seluruh variabel independen sebesar 0, maka pengungkapan CSR senilai dengan 0,067.
2. Nilai koefisien regresi variabel ukuran komite audit 0,028, dapat ditarik kesimpulan yakni ketika variabel meningkat satu satuan, maka pengungkapan CSR meningkat senilai 0,028, dengan taksiran variabel independen lain bersifat konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel dewan komisaris independen 0,122, dapat ditarik kesimpulan yakni ketika dewan komisaris independen meningkat satu satuan, maka pengungkapan CSR meningkat senilai 0,122, dengan taksiran variabel independen lain bersifat konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan pemerintah 0,089, dapat ditarik kesimpulan yakni ketika kepemilikan pemerintah meningkat satu satuan, maka pengungkapan CSR meningkat senilai 0,089, dengan taksiran variabel independen lain bersifat konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional -0,047, dapat ditarik kesimpulan yakni ketika kepemilikan institusional meningkat satu satuan, maka

pengungkapan CSR menurun senilai 0,047, dengan taksiran variabel independen lain bersifat konstan.

6. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan keluarga -0,081, dapat ditarik kesimpulan yakni ketika kepemilikan keluarga meningkat satu satuan, maka pengungkapan CSR menurun senilai 0,081, dengan taksiran variabel independen lain bersifat konstan.
7. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan asing 0,043 dapat ditarik kesimpulan yakni ketika kepemilikan asing meningkat satu satuan, maka pengungkapan CSR menurun 0,043, dengan taksiran variabel independen lain bersifat konstan.

4.5 UJI ADJUSTED R SQUARED (ADJ. R²)

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) pada intinya menakar kemampuan model dalam hal menginterpretasikan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Dari hasil analisis koefisien determinasi pada tabel 4.7 diatas, dihasilkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) model penelitian sejumlah 0,090. Dapat diartikan bahwa hanya 9% pengaruh dari variabel independen atas tingkat pengungkapan CSR. Maka aspek lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan dapat mempengaruhi pengungkapan CSR sebesar 91%.

4.6 UJI HIPOTESIS

4.6.1 Pembahasan Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* dibuktikan

melalui pengujian signifikansi koefisien regresi. Hipotesis pertama pada pengujiannya menghasilkan pernyataan bahwa ukuran komite audit memiliki dampak positif kepada tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Koefisien regresi variabel ini adalah 0,028, kemudian pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) variabel ini nilai signifikansinya sebesar 0,040 yang menjadikan $0,040 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.

Hasil riset selaras dengan hasil penelitian Nurfadilah dan Sagara (2015), yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* dapat dipengaruhi oleh besaran ukuran komite audit. Menurut Nurfadilah dan Sagara (2015) tanggung jawab komite audit yang meliputi *review* perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pada departemen audit internal, perubahan kebijakan dalam praktik akuntansi baik kesesuaiannya terhadap standar akuntansi maupun peraturan hukum lainnya, serta strategi keberlangsungan bisnis membuat *controlling* operasional perusahaan menjadi sangat ketat yang berimbas pada *corporate social responsibility* dan aktivitas pengungkapannya.

4.6.2 Pembahasan Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* dibuktikan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi. Pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social*

responsibility. Koefisien regresi variabel ini adalah 0,122, kemudian pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) variabel ini nilai signifikansinya sebesar 0,023 yang menjadikan $0,023 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* sehingga hipotesis kedua penelitian ini didukung.

Hasil riset selaras dengan hasil penelitian Wibawa (2014) dan Claudya (2015), yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR dengan arah positif. Perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang besar mengungkapkan CSR yang luas. Dewan komisaris independen diharapkan mampu membentengi perusahaan dari pihak yang bermaksud berbuat kecurangan, menjamin keefektifan pengawasan perusahaan secara prosedural dan mekanisme serta sesuai dengan perundang-undangan negara (Pratama, 2013). Dengan demikian semakin banyak komisaris independen perusahaan sanggup mempengaruhi pengungkapan karena program CSR secara otomatis akan selalu diawasi pelaksanaannya.

4.6.3 Pembahasan Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu komposisi kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* dibuktikan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi. Pengujian hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa komposisi kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Koefisien regresi variabel ini adalah 0,089, kemudian pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) variabel ini nilai signifikansinya sebesar 0,019 yang menjadikan $0,019 <$

0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa komposisi kepemilikan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* sehingga hipotesis ketiga penelitian ini didukung.

Hasil riset selaras dengan hasil penelitian Nugroho (2011), yang menyatakan bahwa besarnya proporsi saham pemerintah mampu secara signifikan memperluas tingkat pengungkapan CSR. Perusahaan dapat ditekan oleh pemerintah untuk mematuhi statuta/aturan mengenai CSR dikarenakan fungsinya yang mampu bertindak sebagai regulator. Nugroho (2011) menyatakan bahwa kepemilikan saham pemerintah akan mengakibatkan pengungkapan yang lebih besar tanggung jawab sosial perusahaan, karena pemerintah harus mempromosikan transparansi di antara perusahaan publik. Kepemilikan pemerintah bisa mempertahankan tingkat keseimbangan antara dua tujuan, yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan secara efektif mempengaruhi masyarakat. Selain itu, pemerintah mengatur dan teratur mengeluarkan peraturan yang melindungi masyarakat dan karena itu pemerintah bisa menjadi contoh yang baik dari mensponsori dan mematuhi peraturan tersebut melalui kepemilikan mereka di perusahaan. Disini dapat dilihat bahwa pemerintah dapat menyatukan tujuan manajemen untuk mendapatkan keuntungan dan tujuannya sendiri dengan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, dengan kata lain pemerintah dapat meminimalisir *agency problem* yang dijelaskan dalam teori agensi. Disamping itu tekanan pemerintah dan status pemerintah sebagai regulator membuat pemerintah dengan gencar berupaya untuk melaksanakan aktivitas CSR dan mengungkapkannya dalam pelaporan keuangan.

4.6.4 Pembahasan Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu komposisi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* dibuktikan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi. Pengujian hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa komposisi kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Koefisien regresi variabel ini adalah -0,047, kemudian pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) variabel ini nilai signifikansinya sebesar 0,087 yang menjadikan $0,087 > 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa komposisi kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* sehingga hipotesis keempat penelitian ini tidak didukung.

Hasil riset selaras dengan penelitian Sari dan Rani (2015) yang pada pengujiannya menghasilkan pernyataan yakni kepemilikan institusional tidak berefek signifikan kepada luas pengungkapan CSR. Hal ini disebabkan ketika kepemilikan saham semakin tinggi, maka tingkat intervensi kepada aktivitas dan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan akan semakin tinggi yang dimana hal tersebut akan memaksa manajer melakukan tindakan tertentu demi untuk memenuhi keinginan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian institusi sebagai pemegang saham hanya menjalankan tanggung jawab dan lebih condong untuk memaksimalkan laba dan kenaikan harga saham dari perusahaan yang akan berdampak langsung pada *return* tanpa mepedulikan tanggungjawabnya kepada *stakeholder* lain. Tidak adanya keselarasan tujuan pemegang saham dan juga manajer menjadi tidak sesuai dengan teori agensi yang menjadi salah satu landasan teori pada penelitian ini.

4.6.5 Pembahasan Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima pada penelitian ini yaitu komposisi kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* dibuktikan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi. Pengujian hipotesis kelima pada penelitian ini menyatakan bahwa komposisi kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Koefisien regresi variabel ini adalah -0,081, kemudian pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) variabel ini nilai signifikansinya sebesar 0,016 yang menjadikan $0,016 < 0,05$. Selain itu, variabel ini memiliki rata-rata cukup besar yaitu 8,83% yang mengindikasikan bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang dikendalikan oleh saham keluarga dan mampu menekan manajemen perusahaan untuk melakukan aktivitas sesuai kehendak pemilik saham keluarga. Maka dapat dinyatakan komposisi kepemilikan keluarga memiliki efek negatif signifikan pada aktivitas pengungkapan sehingga hipotesis kelima penelitian ini tidak didukung.

Hasil riset selaras dengan penelitian Wiranata (2013) dan Setyawan (2016) yang pada pengujiannya menghasilkan pernyataan yakni komposisi kepemilikan keluarga secara negatif mempengaruhi *corporate social responsibility* dan pada aktivitas pengungkapan. Komposisi kepemilikan keluarga bukan menjadi acuan yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Wiranata (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan manajemen. Darus dan Othman (2009) dalam Setyawan (2016) menambahkan bahwa dengan adanya kepemilikan keluarga yang signifikan ada risiko tinggi kolusi antara direktur non-eksekutif independen dan pemegang saham keluarga. Dalam situasi seperti itu, direktur non-

eksekutif lebih mungkin untuk mendukung pemegang saham keluarga dalam pengungkapan informasi yang kurang rinci tentang pengungkapan CSR ketimbang memfasilitasi manajer dengan kembali memberlakukan strategi pengungkapan CSR dari perusahaan dimana mereka menjadi anggota dewannya. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya transparansi, tanggung jawab serta akuntabilitas pemegang saham keluarga. Dari penjelasan diatas mengindikasikan bahwa pemilik saham keluarga tidak mau memaksimalkan aktivitas CSR bahkan bisa mengurangnya atas dasar kurangnya fasilitas untuk aktivitas pengungkapan CSR dan juga tindakan kolusi, ini juga membuat indikasi manajer sebagai pihak yang menjalankan aktivitas perusahaan dapat bertindak kecurangan atas dasar mereka juga ingin memenuhi tujuan mereka. Tidak adanya keselarasan tujuan pemegang saham dan juga manajer menjadi tidak sesuai dengan teori agensi yang menjadi salah satu landasan teori pada penelitian ini.

4.6.6 Pembahasan Hipotesis Keenam

Hipotesis keenam pada penelitian ini yaitu komposisi kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* dibuktikan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi. Pengujian hipotesis keenam pada penelitian ini menyatakan bahwa komposisi kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Koefisien regresi pada variabel ini adalah 0,043, kemudian pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) variabel ini nilai signifikansinya sebesar 0,003 yang menjadikan $0,003 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa komposisi kepemilikan asing mampu secara

positif signifikan mempengaruhi *corporate social responsibility* dan pada aktivitas pengungkapan sehingga hipotesis keenam penelitian ini didukung.

Hasil riset selaras dengan penelitian Sungkar (2016), yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham oleh pihak asing menjadikan *corporate social responsibility* dan pengungkapannya sebagai skema *going concern* dan juga sebagai skema pendekatan ke investor agar mendapatkan aliran lanjutan dari modal. Menurut Wibowo (2013) dalam Siregar (2017), perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing cenderung memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan yang tidak. Hal ini disebabkan beberapa alasan. Pertama, perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih terlatih dalam bidang akuntansi dan juga paham pelaksanaan konsep pengungkapan CSR. Kedua, kemungkinan permintaan aktivitas CSR yang lebih besar dari pihak eksternal (masyarakat) kepada perusahaan yang berlatar belakang asing. Ketiga, sistem informasi yang dimiliki perusahaan tersebut mungkin lebih efektif dan efisien untuk mencukupi aliran informasi di internal dan di perusahaan induk.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Setelah melakukan analisis penelitian terhadap 372 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai tingkat keberhasilan dari variabel independen dalam hal ini elemen-elemen *good corporate governance* yaitu ukuran komite audit, komposisi dewan komisaris independen, komposisi kepemilikan pemerintah, komposisi kepemilikan institusional, komposisi kepemilikan keluarga, dan komposisi kepemilikan asing terhadap pengaruhnya pada variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

Variabel pertama yaitu ukuran komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan dapat dipengaruhi dengan baik oleh besaran dari komite audit dikarenakan keberadaannya yang menjadi sebuah indikasi bahwa terjadi peningkatan kualitas pengendalian internal dan memiliki efek yang signifikan bagi kualitas pelaporan tahunan termasuk termasuk laporan pengungkapan *corporate social responsibility* oleh pihak manajemen.

Variabel kedua yaitu komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan dapat dipengaruhi dengan baik oleh besaran jumlah anggota dewan komisaris independen dikarenakan

ketika asas GCG dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya maka dengan kapasitasnya akan mampu mengontrol kegiatan perusahaan serta berperan positif dalam alur informasi sehingga terhindarnya asimetri informasi yang berujung pada peningkatan kualitas pengungkapan informasi termasuk kegiatan CSR.

Variabel ketiga yaitu komposisi kepemilikan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan dapat dipengaruhi dengan baik oleh besaran kepemilikan saham pemerintah dikarenakan semakin besarnya kepemilikan saham akan semakin meningkatkan keefektifan tekanan terhadap manajemen untuk menjalankan CSR sesuai peraturan dan juga pelaporannya

Variabel keempat yaitu komposisi kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan tidak dapat dipengaruhi dengan baik oleh kepemilikan saham institusional dikarenakan pemilik saham hanya memikirkan laba perusahaan sehingga melakukan intervensi terlalu besar yang pada akhirnya mengakibatkan manajemen bertindak hanya untuk memenuhi keinginan pemilik saham.

Variabel kelima yaitu komposisi kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan akan semakin berkurang ketika semakin besarnya kepemilikan keluarga yang kemudian meningkatkan potensi kolusi antara pemilik saham dengan direktur non-eksekutif independen serta manajemen.

Variabel keenam yaitu komposisi kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan dapat dipengaruhi dengan baik oleh besaran kepemilikan saham asing dikarenakan budaya persaingan perusahaan diluar negeri yang bersaing ketat dan berusaha mencari stigma baik dalam aktivitas operasionalnya. Akuntabilitas serta tanggung jawab mereka mampu menjadi jembatan antara *agent* dan *principal* (sesuai dengan teori agensi) yang memiliki dampak baik terhadap operasional perusahaan termasuk aktivitas CSR.

5.2 IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

Dari sudut pandang perusahaan, dapat dilihat adanya komite audit dan dewan komisaris independen berperan penting dalam mengontrol aktivitas perusahaan termasuk aktivitas *corporate social responsibility*. Penelitian ini terbukti bahwa komite audit dan dewan komisaris independen secara positif berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Komite audit dan dewan komisaris independen di dalam perusahaan juga berperan mengontrol mekanisme pengendalian internal perusahaan yang juga mengontrol aktivitas yang dilakukan perusahaan, dengan tujuan meminimalisir kecurangan yang dilakukan manajemen dan mendorong manajemen untuk mengungkapkan *corporate social responsibility*.

Dari sudut pandang investor, pengaruh komposisi kepemilikan asing dan komposisi kepemilikan pemerintah menunjukkan bahwa dalam aktivitas perusahaan pemegang saham juga berperan penting, karena dengan adanya tekanan dari pihak

pemerintah dan asing agar perusahaan mengungkapkan aktivitas sosial yang membuat legitimasi positif dan efek yang didapat adalah kelangsungan hidup perusahaan dan dukungan yang didapatkan perusahaan dari masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas operasionalnya.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menemui kendala yang berdampak pada belum maksimalnya hasil penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan yang belum sempurna. Kendala serta beberapa keterbatasan tersebut yaitu:

1. Tidak semua laporan perusahaan mencantumkan data struktur kepemilikan saham sehingga mengurangi jumlah sampel yang dapat digunakan.
2. Banyak perusahaan yang belum memiliki dan mengoptimalkan situs resmi (*official website*) sebagai media pengungkapan aktivitas perusahaan sehingga menyulitkan penulis mencari informasi tambahan.
3. Pada variabel ukuran komite audit dan dewan komisaris independen, masih menggunakan faktor jumlah anggota dalam pengukurannya, yang mana faktor tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak dipertimbangkannya faktor pengalaman, latar belakang pendidikan, kompetensi, dan loyalitas dari anggota dewan.

5.4 SARAN

1. Agar mendapatkan hasil yang lebih akurat, disarankan pada penelitian berikutnya memakai sampel yang majemuk, misalnya dapat ditujukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Agar mendapatkan hasil yang lebih akurat, sebaiknya pada penelitian yang akan datang memastikan memakai sampel perusahaan yang memenuhi kriteria sehingga mendapatkan sampel yang lebih banyak serta disarankan menggunakan *range* waktu/periode yang lebih lama.
3. Agar mendapatkan varian dan memiliki pengaruh lebih signifikan pada tingkat pengungkapan CSR, disarankan menambah komposisi kepemilikan manajerial dan komposisi kepemilikan masyarakat/publik pada penelitian yang akan datang.
4. Disarankan pada penelitian berikutnya untuk tidak hanya menggunakan faktor jumlah atau banyaknya anggota komite audit dan dewan komisaris independen namun lebih memperdalam indikator-indikator syarat dipilihnya anggota dewan, seperti faktor latar belakang pendidikan, kompetensi, kualitas, dedikasi, dan pengalaman agar variabel dapat lebih teruji signifikansinya terhadap tingkat pengungkapan CSR.
5. Disarankan pada penelitian berikutnya untuk menganalisa lebih dalam faktor apa saja yang membuat variabel kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR.

DAFTAR REFERENSI

- Anam, H., & Liyanto, L. W. (2019). Proporsi Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal GeoEkonomi*, 10(1), 130-149.
- Azwar, S. (2013). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chandrasari, K. D. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014). Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia.
- Claudia, D. E., & Januarti, I. (2015). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan CSR (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013). Skripsi S1 Universitas Diponegoro.
- Farida, N. N., & Abdullah, R. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi pada Perusahaan Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Perbanas Review*, Volume 3 No. 2.
- Forum Corporate Governance Indonesia. (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Diakses pada 17 April 2018, pada: <https://muhariefeffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgiselfassessmentchecklis t.pdf>.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan SPSS*. Semarang: BP UNDIP.
- Global Reporting Initiatives. (2013). Diakses pada 14 April 2018, dari: www.globalreporting.org.
- Habbash, M. (2015). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Saudi Arabia. *Journal of Social Responsibility*, 10(9), 267–283.
- Halimah, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Saham Keluarga Dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Keluarga Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (1998). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1998)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Jayanti, K. R., & Husaini, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 59(1), 16-22.
- Kharismarsha, D. M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia.
- Munsaidah, S., Andini, R., & Supriyanto, A. (2016). Analisis Pengaruh Firm Size, Age, Profitabilitas, Leverage, dan Growth Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Property Dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2010-2014. *Journal Of Accounting*, Volume 2 No. 2.
- Nugroho, M. F. F. A, & Prabowo, T. J. W. (2011). Korelasi Antara Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Tata Kelola Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia.
- Nugroho, M. N., & Yulianto, A. (2015). Pengaruh Profitabilitas Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan Terdaftar JII 2011-2013. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 6-7.
- Nurfadilah, W., & Sagara, Y. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Akuntabilitas*, 8(1), 78-89.
- Octamada, A. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Serta Dampaknya Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK. 04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Pasal 74 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta. Diakses pada 12 April 2018, dari: www.hukumonline.com.
- Pratama, A. G., & Rahardja, R. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Lingkungan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur dan Tambang yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Termasuk dalam PROPER Tahun 2009-2011). Skripsi S1 Universitas Diponegoro.
- Rizky, Z., & Yuyetta, E. N. A. (2015). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Pemerintah, Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Pemerintah, Daya

Saing Industri, serta Profitabilitas Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Diponegoro Journal of Accounting*, 262-271.

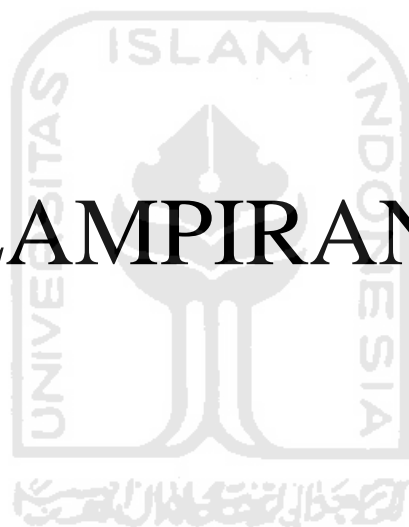
- Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas pajak. *Jurnal Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 16-30.
- Sari, A. R., & Sukoharsono, E. G. (2013). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komposisi Dewan Komisaris, Kinerja Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility di dalam Sustainability Report pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(3), 481-491.
- Sari, P. C. P. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013. Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia.
- Sari, W. N., & Rani, P. (2015). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, return on assets (ROA) dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 4 No. 1.
- Setyawan, A. S. R. (2016). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia.
- Siregar, R. M. M., & Priantinah, D. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, Volume 5 No. 6.
- Sungkar, I. (2016). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia.
- Suprpti, E., Fajari, F. A., & Anwar, A. S. H. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Environmental Disclosure. *Akuntabilitas*, 12(2), 215-226.
- Utari, M. D. (2014). Analisis Pengaruh Kriteria Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Sub-Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JAAKFE)*, Volume 3 No. 1.
- Wardani, D. K., & Haryani, S. (2019). Dampak Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Lingkungan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 67-82.

- Wibawa, G. I. (2014). Pengaruh Elemen Good Corporate Governance Terhadap Pelaporan Corporate Social Responsibility. Skripsi S1 Universitas Dian Nuswantoro.
- Widyasari, N. A., Husaini, A., Suhadak. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 26 No. 1.
- Wiranata, A. Y. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Skripsi S1 Universitas Kristen Satya Wacana.
- Yudastio. (2016). Pengaruh Family Ownership Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti, Real Estate, Dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). Skripsi S1 Universitas Lampung.
- Yuliansyah, Y., Astuti, H. H., & Augustine, Y. (2017). Pengaruh Komisaris Independen (Ki), Corporate Social Responsibility (CSR), Intellectual Capital (IC) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 4(1), 55-74.

www.idx.co.id



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

DAFTAR CHECK LIST INDEX CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

INDEX CSR	
EKONOMI	
EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang di berikan
EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan
LINGKUNGAN/ENVIRONMENT	
EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
EN5	Intensitas energi
EN6	Pengurangan konsumsi energi
EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
EN10	Persentase dan total volume air yang di daur ulang dan digunakan kembali
EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi di luar kawasan lindung
EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN RED LIST dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
EN15	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)
EN16	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
EN17	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
EN18	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

EN19	Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
EN20	Emisi Bahan Perusak Ozon (BPO)
EN21	NO _x , SO _x , dan emisi udara signifikan lainnya
EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi BASEL ² lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi
EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang di reklamasi menurut kategori
EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SOSIAL	
PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA	
LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
LA7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan

	menurut kategori karyawan
LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
LA11	Persentase karyawan yang menerima reviu kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi
HAK ASASI MANUSIA	
HR1	Jumlah total dan persentase yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
HR4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia
HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
MASYARAKAT	
SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan

	program pengembang yang diterapkan
SO2	Operasi dengan dampak negatif yang aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/ penerima manfaat
SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK	
PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Daftar pengungkapan berdasarkan *Reporting Guidelines* yang dimuat dalam

Global Reporting Initiatives (GRI) 2013

Sumber: www.globalreporting.org

LAMPIRAN 2

DATA PERUSAHAAN SAMPEL

KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN
ADES	PT Akasha Wira International Tbk.
ADMG	PT Polychem Indonesia Tbk.
AKPI	PT Argha Karya Prima Industry
ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk.
ALKA	PT Alakasa Industrindo Tbk.
ALMI	PT Alumindo Light Metal Industry Tbk.
ALTO	PT Tri Banyan Tirta Tbk.
AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk.
APLI	PT Asiaplast Industries Tbk.
ARGO	PT Argo Pantes Tbk.
ARNA	PT Arwana Citramulia Tbk.
ASII	PT Astra International Tbk.
AUTO	PT Astra Otoparts Tbk.
BAJA	PT Saranacental Bajatama Tbk.
BATA	PT Sepatu Bata Tbk.
BIMA	PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk.
BOLT	PT Garuda Metalindo Tbk.
BRAM	PT Indo Kordsa Tbk.
BRNA	PT Berlina Tbk.
BRPT	PT Barito Pacific Timber Tbk.
BTON	PT Beton Jaya Manunggal Tbk.
BUDI	PT Budi Acid Jaya Tbk.
CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
CLPI	PT Colorpak Indonesia Tbk.
CNTX	PT Centek Tbk.
CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
CTBN	PT Citra Tubindo Tbk.
DLTA	PT Delta Djakarta Tbk.
DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria
EKAD	PT Ekadharna International Tbk.
ERTX	PT Eratex Djaja Tbk.
ESTI	PT Ever Shine Tex Tbk.
FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk.k
FPNI	PT Titan Kimia Nusantara Tbk.
GDYR	PT Goodyear Indonesia Tbk.
GDST	PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk.
GGRM	PT Gudang Garam Tbk.
GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk.
HDTX	PT Panasia Indosyntec Tbk.
HMSP	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
IGAR	PT Champion Pasific Indonesia Tbk.
IKAI	PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.
IKBI	PT Sumi Indo Kabel Tbk.
IMAS	PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.
IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk.
INAF	PT Indofarma Tbk.
INAI	PT Indal Aluminium Industri Tbk.
INCI	PT Intanwijaya Internasional Tbk.
INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
INDR	PT Indo-Rama Synthetics Tbk.
INDS	PT Indospring Tbk.
INKP	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
INRU	PT Toba Pulp Lestari Tbk.
INTP	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
IPOL	PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
JECC	PT Jembo Cable Company Tbk.
JKSW	PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk.
JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
KAEF	PT Kimia Farma Tbk.
KBLI	PT KMI Wire & Cable Tbk.
KARW	PT ICTSI Jasa Prima Tbk.
KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk.
KBRI	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk.
KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk.
KIAS	PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk.
KICI	PT Kedaung Indah Can Tbk.
KRAS	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
KLBF	PT Kalbe Farma Tbk.
LION	PT Lion Metal Works Tbk.
LMPI	PT Langgeng Makmur Industri Tbk.
LMSH	PT Lionmesh Prima Tbk.
LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk.
MAIN	PT Malindo Feedmill Tbk.
MASA	PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
MBTO	PT Martina Berto Tbk.
MERK	PT Merck Tbk.
MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.
MLIA	PT Mulia Industrindo Tbk.
MRAT	PT Mustika Ratu Tbk.
MYOR	PT Mayora Indah Tbk.
MYTX	PT Asia Pacific Investama Tbk.
NIKL	PT Pelat Timah Nusantara Tbk.
PBRX	PT Pan Brothers Tbk.
PICO	PT Pelangi Indah Canindo Tbk.
POLY	PT Asia Pacific Fibers Tbk.

PRAS	PT Prima Alloy Steel Universal Tbk.
PTSN	PT Sat Nusapersada Tbk.
PSDN	PT Prasadha Aneka Niaga Tbk.
PYFA	PT Pyridam Farma Tbk.
RICY	PT Ricky Putra Globalindo Tbk.
RMBA	PT Bentoel International Investama Tbk.
ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk.
SIDO	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
SIPD	PT Sierad Produce Tbk.
SKLT	PT Sekar Laut Tbk.
SMBR	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
SMCB	PT Holcim Indonesia Tbk.
SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk.
SPMA	PT Suparma Tbk.
SRIL	PT Sri Rejeki Isman Tbk.
SRSN	PT Indo Acidatama Tbk.
SSTM	PT Sunson Textile Manufacture Tbk.
STTP	PT Siantar Top Tbk.
SULI	PT SLJ Global Tbk.
TBMS	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk.
TFCO	PT Tifico Fiber Indonesia Tbk.
TCID	PT Mandom Indonesia Tbk.
TIRT	PT Tirta Mahakam Resources Tbk.
TKIM	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk.
TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
TRIS	PT Trisula International Tbk.
TRST	PT Trias Sentosa Tbk.
TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk.
ULTJ	PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk.
UNIC	PT Unggul Indah Cahaya Tbl.
UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk.
UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk.
VOKS	PT Voksel Electric Tbk.
WIIM	PT Wismilak Inti Makmur Tbk.
YPAS	PT Yanaprima Hastapersada Tbk.

LAMPIRAN 3
NILAI SETIAP VARIABEL
TAHUN 2016

CSR, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen 2016

NO	NAMA PERUSAHAAN	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY			KA	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN		
		CSRSD	CSRi	CSRDi		ADKI	ADK	KDKI
1	ADES	22	91	0,2418	3	1	3	0,33333
2	ADMG	15	91	0,1648	3	1	4	0,25
3	AKPI	12	91	0,1319	3	2	6	0,33333
4	ALDO	15	91	0,1648	3	1	3	0,33333
5	ALKA	12	91	0,1319	3	1	3	0,33333
6	ALMI	9	91	0,0989	3	1	3	0,33333
7	ALTO	18	91	0,1978	3	1	2	0,5
8	AMFG	13	91	0,1429	3	2	6	0,33333
9	APLI	15	91	0,1648	3	1	3	0,33333
10	ARGO	12	91	0,1319	3	2	6	0,33333
11	ARNA	12	91	0,1319	3	2	4	0,5
12	ASII	38	91	0,4176	4	4	11	0,36364
13	AUTO	38	91	0,4176	3	3	8	0,375
14	BAJA	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333
15	BATA	15	91	0,1648	3	2	4	0,5
16	BIMA	15	91	0,1648	3	2	3	0,66667
17	BOLT	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333
18	BRAM	12	91	0,1319	3	2	5	0,4
19	BRNA	14	91	0,1538	3	2	5	0,4
20	BRPT	6	91	0,0659	3	1	3	0,33333
21	BTON	20	91	0,2198	3	1	2	0,5
22	BUDI	25	91	0,2747	3	1	3	0,33333
23	CEKA	6	91	0,0659	3	2	4	0,5
24	CLPI	12	91	0,1319	3	1	3	0,33333
25	CNTX	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333
26	CPIN	7	91	0,0769	4	1	3	0,33333
27	CTBN	18	91	0,1978	3	2	6	0,33333
28	DLTA	18	91	0,1978	3	2	5	0,4
29	DVLA	22	91	0,2418	3	3	7	0,42857
30	EKAD	2	91	0,0220	3	1	3	0,33333
31	ERTX	21	91	0,2308	3	1	3	0,33333
32	ESTI	21	91	0,2308	3	1	2	0,5
33	FASW	21	91	0,2308	3	2	5	0,4
34	FPNI	24	91	0,2637	3	1	2	0,5
35	GDYR	24	91	0,2637	3	1	3	0,33333
36	GDST	4	91	0,0440	3	1	2	0,5
37	GGRM	21	91	0,2308	3	2	4	0,5
38	GJTL	2	91	0,0220	3	2	9	0,22222
39	HDTX	20	91	0,2198	3	1	3	0,33333
40	HMSP	21	91	0,2308	3	3	6	0,5
41	ICBP	16	91	0,1758	3	3	6	0,5
42	IGAR	4	91	0,0440	3	1	3	0,33333
43	IKAI	4	91	0,0440	3	1	2	0,5
44	IKBI	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333
45	IMAS	21	91	0,2308	3	3	6	0,5
46	IMPC	18	91	0,1978	3	1	2	0,5
47	INAF	24	91	0,2637	3	1	3	0,33333
48	INAI	3	91	0,0330	3	1	3	0,33333
49	INCI	21	91	0,2308	3	1	3	0,33333
50	INDF	21	91	0,2308	3	3	8	0,375
51	INDR	21	91	0,2308	3	1	3	0,33333
52	INDS	21	91	0,2308	3	1	3	0,33333
53	INKP	22	91	0,2418	3	3	7	0,42857
54	INRU	2	91	0,0220	3	2	4	0,5
55	INTP	21	91	0,2308	3	3	6	0,5
56	IPOL	22	91	0,2418	3	1	3	0,33333
57	JECC	18	91	0,1978	3	2	4	0,5
58	JKSW	2	91	0,0220	3	2	5	0,4
59	JPFA	21	91	0,2308	3	2	6	0,33333
60	KAEF	16	91	0,1758	3	1	2	0,5
61	KBLI	24	91	0,2637	4	1	5	0,2
62	KARW	2	91	0,0220	3	2	6	0,33333
63	KBLM	22	91	0,2418	3	1	3	0,33333
64	KBRI	5	91	0,0549	3	1	2	0,5

NO	NAMA PERUSAHAAN	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY			KA	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN		
		CSRSD	CSRI	CSRDI		ADKI	ADK	KDKI
65	KDSI	5	91	0,0549	3	2	4	0,5
66	KIAS	9	91	0,0989	3	2	6	0,33333
67	KICI	9	91	0,0989	3	1	3	0,33333
68	KRAS	29	91	0,3187	3	2	4	0,5
69	KLBF	18	91	0,1978	3	3	7	0,42857
70	LION	19	91	0,2088	3	1	3	0,33333
71	LMPI	8	91	0,0879	3	1	2	0,5
72	LMSH	6	91	0,0659	3	1	3	0,33333
73	LPIN	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333
74	MAIN	8	91	0,0879	5	3	5	0,6
75	MASA	8	91	0,0879	3	2	5	0,4
76	MBTO	8	91	0,0879	2	1	3	0,33333
77	MERK	8	91	0,0879	3	1	3	0,33333
78	MLBI	8	91	0,0879	3	3	6	0,5
79	MLIA	8	91	0,0879	3	1	4	0,25
80	MRAT	8	91	0,0879	3	1	3	0,33333
81	MYOR	8	91	0,0879	3	2	5	0,4
82	MYTX	12	91	0,1319	2	1	4	0,25
83	NIKL	9	91	0,0989	3	1	3	0,33333
84	PBRX	8	91	0,0879	3	1	3	0,33333
85	PICO	14	91	0,1538	3	1	3	0,33333
86	POLY	18	91	0,1978	3	2	6	0,33333
87	PRAS	26	91	0,2857	3	1	3	0,33333
88	PTSN	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333
89	PSDN	5	91	0,0549	3	2	6	0,33333
90	PYFA	8	91	0,0879	4	2	4	0,5
91	RICY	12	91	0,1319	3	1	3	0,33333
92	RMBA	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333
93	ROTI	8	91	0,0879	3	1	3	0,33333
94	SCCO	8	91	0,0879	3	1	3	0,33333
95	SIDO	14	91	0,1538	3	1	3	0,33333
96	SIPD	12	91	0,1319	3	1	3	0,33333
97	SKLT	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333
98	SMBR	23	91	0,2527	3	1	5	0,2
99	SMCB	23	91	0,2527	3	3	8	0,375
100	SMGR	43	91	0,4725	6	3	7	0,42857
101	SMSM	19	91	0,2088	3	1	2	0,5
102	SPMA	19	91	0,2088	3	3	5	0,6
103	SRIL	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333
104	SRSN	13	91	0,1429	3	3	8	0,375
105	SSTM	13	91	0,1429	3	2	5	0,4
106	STTP	13	91	0,1429	3	1	2	0,5
107	SULI	13	91	0,1429	3	2	4	0,5
108	TBMS	13	91	0,1429	3	2	5	0,4
109	TFCO	13	91	0,1429	3	1	3	0,33333
110	TCID	13	91	0,1429	3	3	6	0,5
111	TIRT	11	91	0,1209	3	1	3	0,33333
112	TKIM	38	91	0,4176	3	3	7	0,42857
113	TOTO	1	91	0,0110	3	2	5	0,4
114	TPIA	17	91	0,1868	3	3	7	0,42857
115	TRIS	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333
116	TRST	17	91	0,1868	3	1	3	0,33333
117	TSPC	17	91	0,1868	3	3	5	0,6
118	ULTJ	17	91	0,1868	3	1	3	0,33333
119	UNIC	18	91	0,1978	3	2	5	0,4
120	UNIT	17	91	0,1868	3	1	2	0,5
121	UNVR	38	91	0,4176	3	2	5	0,4
122	VOKS	18	91	0,1978	3	2	6	0,33333
123	WIIM	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333
124	YPAS	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333

Pemerintah dan Institusional 2016

NP	KKP			KKI		
	JSP	JSB	KKP	JSI	JSB	KKI
ADES		589.896.800	0	539.896.713	589.896.800	0,91524
ADMG		3.889.179.559	0	3.324.921.010	3.889.179.559	0,85492
AKPI		680.000.000	0	540.458.323	680.000.000	0,79479
ALDO		550.000.000	0	321.230.769	550.000.000	0,58406
ALKA		507.665.055	0	472.476.555	507.665.055	0,93069
ALMI		616.000.000	0	471.142.566	616.000.000	0,76484

NP	KKP			KKI		
	JSP	JSB	KKP	JSI	JSB	KKI
ALTO		2.191.870.558	0	825.344.199	2.191.870.558	0,37655
AMFG		434.000.000	0	177.799.700	434.000.000	0,40968
APLI		1.362.671.400	0	801.304.000	1.362.671.400	0,58804
ARGO		335.557.450	0	184.023.250	335.557.450	0,54841
ARNA		7.341.430.976	0	1.026.150.000	7.341.430.976	0,13978
ASII		40.483.553.140	0	20.288.255.040	40.483.553.140	0,50115
AUTO		4.819.733.000	0	3.855.786.337	4.819.733.000	0,8
BAJA		1.800.000.000	0		1.800.000.000	0
BATA		1.300.000.000	0	1.132.954.500	1.300.000.000	0,8715
BIMA		608.175.716	0	562.532.716	608.175.716	0,92495
BOLT		2.343.750.000	0	1.350.000.000	2.343.750.000	0,576
BRAM		450.000.000	0	298.384.682	450.000.000	0,66308
BRNA		979.110.000	0	534.252.162	979.110.000	0,54565
BRPT		13.959.785.568	0	266.413.800	13.959.785.568	0,01908
BTON		720.000.000	0	14.138.000	720.000.000	0,01964
BUDI		4.498.997.362	0	2.402.568.831	4.498.997.362	0,53402
CEKA		595.000.000	0	517.771.000	595.000.000	0,8702
CLPI		306.338.500	0	178.985.300	306.338.500	0,58427
CNTX		200.000.000	0	181.549.000	200.000.000	0,90775
CPIN		16.398.000.000	0	9.106.385.410	16.398.000.000	0,55534
CTBN		800.371.500	0	709.846.300	800.371.500	0,8869
DLTA	186.846.000	800.659.050	0,23337	467.061.150	800.659.050	0,58335
DVLA		1.120.000.000	0	1.031.800.912	1.120.000.000	0,92125
EKAD		698.775.000	0	536.712.320	698.775.000	0,76808
ERTX		1.286.539.792	0	1.227.082.192	1.286.539.792	0,95378
ESTI		2.015.208.720	0	1.751.033.353	2.015.208.720	0,86891
FASW		2.477.888.787	0	1.856.242.100	2.477.888.787	0,74912
FPNI		5.566.414.000	0	5.148.902.750	5.566.414.000	0,92499
GDYR		410.000.000	0	348.500.000	410.000.000	0,85
GDST		8.200.000.000	0	196.219.400	8.200.000.000	0,02393
GGRM		1.924.088.000	0	1.453.589.500	1.924.088.000	0,75547
GJTL		3.484.800.000	0	2.073.452.443	3.484.800.000	0,595
HDTX		3.601.462.800	0	3.285.372.360	3.601.462.800	0,91223
HMSP		116.318.076.900	0	107.594.221.125	116.318.076.900	0,925
ICBP		11.661.908.000	0	9.391.678.000	11.661.908.000	0,80533
IGAR		972.204.500	0	824.612.420	972.204.500	0,84819
IKAI		12.096.181.261	0	5.769.448.266	12.096.181.261	0,47696
IKBI		1.224.000.000	0	1.128.486.000	1.224.000.000	0,92197
IMAS		2.765.278.412	0	2.479.277.424	2.765.278.412	0,89657
IMPC		4.833.500.000	0	4.317.042.954	4.833.500.000	0,89315
INAF	2.500.000.000	3.099.267.500	0,80664	199.996.500	3.099.267.500	0,06453
INAI		181.035.556	0		181.035.556	0
INCI		196.121.237	0		196.121.237	0
INDF		8.780.426.500	0	4.396.103.450	8.780.426.500	0,50067
INDR		654.351.707	0	351.473.114	654.351.707	0,53713
INDS		656.249.710	0	578.210.207	656.249.710	0,88108
INKP		5.470.982.941	0	2.884.473.498	5.470.982.941	0,52723
INRU		1.388.883.283	0	1.283.649.894	1.388.883.283	0,92423
INTP		3.681.231.699	0	1.877.480.863	3.681.231.699	0,51001
IPOL		6.443.379.509	0	5.062.818.980	6.443.379.509	0,78574
JECC		7.071.923.935	0	4.020.063.930	7.071.923.935	0,56845
JKSW		151.200.000	0	136.303.300	151.200.000	0,90148
JPFA		11.410.522.910	0	7.186.031.335	11.410.522.910	0,62977
KAEF		150.000.000	0	88.847.000	150.000.000	0,59231
KBLI	5.000.000.000	5.554.000.000	0,90025	5.000.000.000	5.554.000.000	0,90025
KARW		4.007.235.107	0	2.304.962.599	4.007.235.107	0,5752

NP	KKP			KKI		
	JSP	JSB	KKP	JSI	JSB	KKI
KBLM		1.120.000.000	0	847.095.400	1.120.000.000	0,75634
KBRI		8.687.995.734	0	6.515.996.801	8.687.995.734	0,75
KDSI		405.000.000	0	317.691.000	405.000.000	0,78442
KIAS		14.929.100.000	0	14.666.550.953	14.929.100.000	0,98241
KICI		276.000.000	0	230.059.680	276.000.000	0,83355
KRAS		1.428.571.500	0	1.141.221.900	1.428.571.500	0,79886
KLBF		46.875.122.110	0	26.614.076.385	46.875.122.110	0,56777
LION		520.016.000	0	300.120.000	520.016.000	0,57714
LMPI		1.008.517.669	0	179.313.291	1.008.517.669	0,1778
LMSH		96.000.000	0	30.927.000	96.000.000	0,32216
LPIN		106.250.000	0	86.811.600	106.250.000	0,81705
MAIN		2.238.750.000	0	1.282.143.142	2.238.750.000	0,5727
MASA		9.182.946.945	0	2.899.632.000	9.182.946.945	0,31576
MBTO		1.070.000.000	0	724.928.500	1.070.000.000	0,6775
MERK		448.000.000	0	388.194.920	448.000.000	0,86651
MLBI		2.107.000.000	0	1.723.151.000	2.107.000.000	0,81782
MLIA		1.271.994.200	0	889.685.722	1.271.994.200	0,69944
MRAT		428.000.000	0	343.122.800	428.000.000	0,80169
MYOR		22.358.699.725	0	13.207.471.425	22.358.699.725	0,59071
MYTX		1.466.666.577	0	1.169.360.540	1.466.666.577	0,79729
NIKL		2.523.350.000	0	2.131.776.450	2.523.350.000	0,84482
PBRX		6.478.295.611	0	3.099.345.123	6.478.295.611	0,47842
PICO		568.375.000	0	534.338.000	568.375.000	0,94012
POLY		2.495.753.347	0	1.575.200.101	2.495.753.347	0,63115
PRAS		701.043.478	0	379.043.478	701.043.478	0,54068
PTSN		1.771.448.000	0	177.144.800	1.771.448.000	0,1
PSDN		1.440.000.000	0	947.660.545	1.440.000.000	0,6581
PYFA		535.080.000	0	288.119.974	535.080.000	0,53846
RICY		641.717.510	0	308.287.600	641.717.510	0,48041
RMBA		36.401.136.250	0	36.317.403.116	36.401.136.250	0,9977
ROTI		6.186.488.888	0	4.348.028.207	6.186.488.888	0,70283
SCCO		205.583.400	0	122.000.000	205.583.400	0,59343
SIDO		15.000.000.000	0	12.150.000.000	15.000.000.000	0,81
SIPD		1.339.102.579	0	1.141.517.065	1.339.102.579	0,85245
SKLT		690.740.500	0	663.740.500	690.740.500	0,96091
SMBR	7.500.000.000	9.837.678.500	0,76237		9.837.678.500	0
SMCB		7.662.900.000	0	6.179.612.820	7.662.900.000	0,80643
SMGR	3.025.406	5.931.520	0,51006		5.931.520	0
SMSM		5.758.675.440	0	3.347.263.708	5.758.675.440	0,58126
SPMA		2.114.570.958	0	1.764.759.797	2.114.570.958	0,83457
SRIL		20.452.176.844	0	12.072.841.076	20.452.176.844	0,5903
SRSN		6.020.000.000	0	1.974.198.800	6.020.000.000	0,32794
SSTM		1.170.909.181	0	480.000.000	1.170.909.181	0,40994
STTP		1.310.000.000	0	743.600.500	1.310.000.000	0,56763
SULI		3.986.916.802	0	1.309.880.219	3.986.916.802	0,32854
TBMS		367.340.000	0	316.763.000	367.340.000	0,86232
TFCO		4.823.076.400	0	3.243.290.132	4.823.076.400	0,67245
TCID		201.066.667	0	148.438.129	201.066.667	0,73825
TIRT		1.011.774.750	0	789.633.654	1.011.774.750	0,78044
TKIM		3.113.223.570	0	1.857.744.987	3.113.223.570	0,59673
TOTO		10.320.000.000	0	9.531.686.400	10.320.000.000	0,92361
TPIA		17.833.520.260	0	13.700.443.835	17.833.520.260	0,76824
TRIS		1.047.587.802	0	700.000.000	1.047.587.802	0,6682
TRST		2.808.000.000	0	1.622.167.825	2.808.000.000	0,5777
TSPC		4.500.000.000	0	3.551.607.218	4.500.000.000	0,78925
ULTJ		11.553.528.000	0	4.258.588.260	11.553.528.000	0,3686

NP	KKP			KKI		
	JSP	JSB	KKP	JSI	JSB	KKI
UNIC		383.331.363	0	222.647.461	383.331.363	0,58082
UNIT		75.422.200	0	41.323.425	75.422.200	0,54789
UNVR		7.630.000.000	0	6.484.877.500	7.630.000.000	0,84992
VOKS		4.155.602.595	0	1.666.510.165	4.155.602.595	0,40103
WIIM		2.099.873.760	0	108.000.000	2.099.873.760	0,05143
YPAS		668.000.089	0	597.650.500	668.000.089	0,89469

Keluarga dan Asing 2016

NP	KKK			KKA		
	JSK	JSB	KKK	JSA	JSB	KKA
ADES		589.896.800	0	539.896.713	589.896.800	0,91524
ADMG		3.889.179.559	0	1.925.414.417	3.889.179.559	0,49507
AKPI		680.000.000	0		680.000.000	0
ALDO		550.000.000	0		550.000.000	0
ALKA		507.665.055	0		507.665.055	0
ALMI		616.000.000	0		616.000.000	0
ALTO	49.000.000	2.191.870.558	0,02236		2.191.870.558	0
AMFG		434.000.000	0	190.359.000	434.000.000	0,43862
APLI	364.209.148	1.362.671.400	0,26728		1.362.671.400	0
ARGO		335.557.450	0	34.738.750	335.557.450	0,10353
ARNA	2.740.000.000	7.341.430.976	0,37322		7.341.430.976	0
ASII		40.483.553.140	0	20.288.255.040	40.483.553.140	0,50115
AUTO		4.819.733.000	0	3.855.786.337	4.819.733.000	0,8
BAJA	1.400.080.000	1.800.000.000	0,77782		1.800.000.000	0
BATA		1.300.000.000	0	1.132.954.500	1.300.000.000	0,8715
BIMA		608.175.716	0		608.175.716	0
BOLT	525.000.000	2.343.750.000	0,224		2.343.750.000	0
BRAM	129.934.471	450.000.000	0,28874	273.153.182	450.000.000	0,60701
BRNA	70.776.900	979.110.000	0,07229		979.110.000	0
BRPT	9.937.629.472	13.959.785.568	0,71188		13.959.785.568	0
BTON	644.000.000	720.000.000	0,89444		720.000.000	0
BUDI		4.498.997.362	0		4.498.997.362	0
CEKA		595.000.000	0	29.700.000	595.000.000	0,04992
CLPI	20.364.500	306.338.500	0,06648	156.230.000	306.338.500	0,50999
CNTX		200.000.000	0	137.310.000	200.000.000	0,68655
CPIN		16.398.000.000	0	526.300	16.398.000.000	3,2E-05
CTBN		800.371.500	0	709.846.300	800.371.500	0,8869
DLTA		800.659.050	0	467.061.150	800.659.050	0,58335
DVLA		1.120.000.000	0	1.031.800.912	1.120.000.000	0,92125
EKAD		698.775.000	0		698.775.000	0
ERTX		1.286.539.792	0		1.286.539.792	0
ESTI		2.015.208.720	0		2.015.208.720	0
FASW		2.477.888.787	0		2.477.888.787	0
FPNI		5.566.414.000	0	5.148.902.750	5.566.414.000	0,92499
GDYR		410.000.000	0	348.500.000	410.000.000	0,85
GDST	7.159.870.000	8.200.000.000	0,87315		8.200.000.000	0
GGRM	17.702.200	1.924.088.000	0,0092		1.924.088.000	0
GJTL		3.484.800.000	0	2.073.452.443	3.484.800.000	0,595
HDTX		3.601.462.800	0	2.760.880.100	3.601.462.800	0,7666
HMSP		116.318.076.900	0		116.318.076.900	0
ICBP		11.661.908.000	0		11.661.908.000	0
IGAR		972.204.500	0		972.204.500	0
IKAI		12.096.181.261	0	2.477.369.656	12.096.181.261	0,20481
IKBI		1.224.000.000	0	1.128.486.000	1.224.000.000	0,92197
IMAS		2.765.278.412	0	1.976.765.774	2.765.278.412	0,71485
IMPC		4.833.500.000	0		4.833.500.000	0

NP	KKK			KKA		
	JSK	JSB	KKK	JSA	JSB	KKA
INAF		3.099.267.500	0		3.099.267.500	0
INAI	88.476.608	181.035.556	0,48873		181.035.556	0
INCI	95.915.307	196.121.237	0,48906		196.121.237	0
INDF		8.780.426.500	0	4.396.103.450	8.780.426.500	0,50067
INDR		654.351.707	0		654.351.707	0
INDS		656.249.710	0		656.249.710	0
INKP		5.470.982.941	0		5.470.982.941	0
INRU		1.388.883.283	0	1.283.649.894	1.388.883.283	0,92423
INTP		3.681.231.699	0	1.877.480.863	3.681.231.699	0,51001
IPOL		6.443.379.509	0	3.395.064.270	6.443.379.509	0,52691
JECC		7.071.923.935	0		7.071.923.935	0
JKSW		151.200.000	0	30.240.000	151.200.000	0,2
JPFA		11.410.522.910	0	7.186.031.335	11.410.522.910	0,62977
KAEF		150.000.000	0	2.000.000	150.000.000	0,01333
KBLI		5.554.000.000	0		5.554.000.000	0
KARW		4.007.235.107	0	2.304.962.599	4.007.235.107	0,5752
KBLM		1.120.000.000	0	180.000.000	1.120.000.000	0,16071
KBRI		8.687.995.734	0	6.515.996.801	8.687.995.734	0,75
KDSI	22.276.200	405.000.000	0,055		405.000.000	0
KIAS		14.929.100.000	0	14.378.410.753	14.929.100.000	0,96311
KICI		276.000.000	0	230.059.680	276.000.000	0,83355
KRAS	150.990.000	1.428.571.500	0,10569	148.364.800	1.428.571.500	0,10386
KLBF		46.875.122.110	0		46.875.122.110	0
LION		520.016.000	0	300.120.000	520.016.000	0,57714
LMPI	688.570.411	1.008.517.669	0,68275		1.008.517.669	0
LMSH	24.565.000	96.000.000	0,25589	30.927.000	96.000.000	0,32216
LPIN		106.250.000	0		106.250.000	0
MAIN		2.238.750.000	0	1.282.143.142	2.238.750.000	0,5727
MASA	1.891.295.999	9.182.946.945	0,20596	2.899.632.000	9.182.946.945	0,31576
MBTO		1.070.000.000	0		1.070.000.000	0
MERK		448.000.000	0		448.000.000	0
MLBI		2.107.000.000	0	1.723.151.000	2.107.000.000	0,81782
MLIA	109.021.300	1.271.994.200	0,08571		1.271.994.200	0
MRAT		428.000.000	0		428.000.000	0
MYOR	5.638.834.400	22.358.699.725	0,2522		22.358.699.725	0
MYTX		1.466.666.577	0		1.466.666.577	0
NIKL		2.523.350.000	0	1.387.842.500	2.523.350.000	0,55
PBRX		6.478.295.611	0		6.478.295.611	0
PICO		568.375.000	0	272.875.000	568.375.000	0,4801
POLY		2.495.753.347	0	1.443.805.382	2.495.753.347	0,5785
PRAS		701.043.478	0	113.043.478	701.043.478	0,16125
PTSN	1.240.060.000	1.771.448.000	0,70003		1.771.448.000	0
PSDN	272.378.790	1.440.000.000	0,18915		1.440.000.000	0
PYFA	160.289.311	535.080.000	0,29956		535.080.000	0
RICY	35.114.500	641.717.510	0,05472	209.095.500	641.717.510	0,32584
RMBA		36.401.136.250	0	36.317.403.116	36.401.136.250	0,9977
ROTI		6.186.488.888	0	2.753.561.207	6.186.488.888	0,44509
SCCO		205.583.400	0	24.275.640	205.583.400	0,11808
SIDO		15.000.000.000	0		15.000.000.000	0
SIPD		1.339.102.579	0		1.339.102.579	0
SKLT		690.740.500	0	396.386.250	690.740.500	0,57386
SMBR		9.837.678.500	0		9.837.678.500	0
SMCB		7.662.900.000	0	6.197.612.820	7.662.900.000	0,80878
SMGR		5.931.520	0		5.931.520	0
SMSM		5.758.675.440	0		5.758.675.440	0
SPMA		2.114.570.958	0	769.058.900	2.114.570.958	0,3637

NP	KKK			KKA		
	JSK	JSB	KKK	JSA	JSB	KKA
SRIL		20.452.176.844	0		20.452.176.844	0
SRSN	3.039.953.512	6.020.000.000	0,50498		6.020.000.000	0
SSTM	414.511.265	1.170.909.181	0,35401		1.170.909.181	0
STTP		1.310.000.000	0		1.310.000.000	0
SULI	1.523.442.282	3.986.916.802	0,38211	1.309.880.219	3.986.916.802	0,32854
TBMS		367.340.000	0	316.763.000	367.340.000	0,86232
TFCO		4.823.076.400	0		4.823.076.400	0
TCID		201.066.667	0	122.319.485	201.066.667	0,60835
TIRT		1.011.774.750	0		1.011.774.750	0
TKIM		3.113.223.570	0		3.113.223.570	0
TOTO		10.320.000.000	0	3.911.546.800	10.320.000.000	0,37903
TPIA	2.633.449.995	17.833.520.260	0,14767	13.700.443.835	17.833.520.260	0,76824
TRIS		1.047.587.802	0		1.047.587.802	0
TRST		2.808.000.000	0		2.808.000.000	0
TSPC		4.500.000.000	0		4.500.000.000	0
ULTJ	3.986.948.900	11.553.528.000	0,34508		11.553.528.000	0
UNIC		383.331.363	0	222.647.461	383.331.363	0,58082
UNIT		75.422.200	0	41.323.425	75.422.200	0,54789
UNVR		7.630.000.000	0	6.484.877.500	7.630.000.000	0,84992
VOKS	738.552.585	4.155.602.595	0,17772	1.666.510.165	4.155.602.595	0,40103
WIIM	1.291.935.117	2.099.873.760	0,61524		2.099.873.760	0
YPAS		668.000.089	0		668.000.089	0

Keterangan :

NP : Nama Perusahaan

CSR : *Corporate Social Responsibility*

CSRDi : *Corporate Social Responsibility Disclosure*

CSRI : *Corporate Social Responsibility index*

CSRDi : *Corporate Social Responsibility Disclosure per index*

KA : Komite Audit

ADKI : Anggota Dewan Komisaris Independen

ADK : Anggota Dewan Komisaris

KDKI : Komposisi Dewan Komisaris Independen

KKP : Komposisi Kepemilikan Pemerintah

JSP : Jumlah Saham Pemerintah

KKI : Komposisi Kepemilikan Institusional

JSI : Jumlah Saham Institusional

KKK : Komposisi Kepemilikan Keluarga

JSK : Jumlah Saham Keluarga

KKA : Komposisi Kepemilikan Asing

JSA : Jumlah Saham Asing

JSB : Jumlah Saham Beredar

LAMPIRAN 4
NILAI SETIAP VARIABEL
TAHUN 2017

CSR, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen 2017

NO	NAMA PERUSAHAAN	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY			KA	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN		
		CSRSD	CSRi	CSRDi		ADKI	ADK	KDKI
1	ADES	11	91	0,1209	3	1	3	0,33333
2	ADMG	16	91	0,1758	3	1	4	0,25
3	AKPI	13	91	0,1429	3	2	6	0,33333
4	ALDO	16	91	0,1758	3	1	3	0,33333
5	ALKA	13	91	0,1429	3	1	3	0,33333
6	ALMI	10	91	0,1099	3	1	3	0,33333
7	ALTO	19	91	0,2088	3	1	2	0,5
8	AMFG	14	91	0,1538	3	2	6	0,33333
9	APLI	16	91	0,1758	3	1	3	0,33333
10	ARGO	13	91	0,1429	3	2	6	0,33333
11	ARNA	14	91	0,1538	4	2	4	0,5
12	ASII	39	91	0,4286	4	4	11	0,36364
13	AUTO	39	91	0,4286	3	3	8	0,375
14	BAJA	19	91	0,2088	3	1	3	0,33333
15	BATA	25	91	0,2747	3	2	4	0,5
16	BIMA	16	91	0,1758	3	2	3	0,66667
17	BOLT	19	91	0,2088	3	1	3	0,33333
18	BRAM	13	91	0,1429	3	2	5	0,4
19	BRNA	15	91	0,1648	3	2	5	0,4
20	BRPT	7	91	0,0769	3	1	3	0,33333
21	BTON	21	91	0,2308	3	1	2	0,5
22	BUDI	25	91	0,2747	3	1	3	0,33333
23	CEKA	16	91	0,1758	3	2	4	0,5
24	CLPI	13	91	0,1429	3	1	3	0,33333
25	CNTX	19	91	0,2088	3	1	3	0,33333
26	CPIN	8	91	0,0879	4	1	3	0,33333
27	CTBN	8	91	0,0879	3	2	6	0,33333
28	DLTA	5	91	0,0549	3	2	5	0,4
29	DVLA	23	91	0,2527	3	3	7	0,42857
30	EKAD	3	91	0,0330	3	1	3	0,33333
31	ERTX	22	91	0,2418	3	1	3	0,33333
32	ESTI	22	91	0,2418	3	1	2	0,5
33	FASW	22	91	0,2418	3	2	5	0,4
34	FPNI	25	91	0,2747	3	1	2	0,5
35	GDYR	25	91	0,2747	3	1	3	0,33333
36	GDST	5	91	0,0549	3	1	2	0,5
37	GGRM	22	91	0,2418	3	2	4	0,5
38	GJTL	3	91	0,0330	3	2	9	0,22222
39	HDTX	21	91	0,2308	3	1	3	0,33333
40	HMSP	22	91	0,2418	3	3	6	0,5
41	ICBP	16	91	0,1758	3	3	6	0,5
42	IGAR	5	91	0,0549	3	1	3	0,33333
43	IKAI	5	91	0,0549	4	1	2	0,5
44	IKBI	19	91	0,2088	3	1	3	0,33333
45	IMAS	22	91	0,2418	3	3	6	0,5
46	IMPC	19	91	0,2088	3	1	2	0,5
47	INAF	22	91	0,2418	3	1	3	0,33333
48	INAI	4	91	0,0440	3	1	3	0,33333
49	INCI	22	91	0,2418	3	1	3	0,33333
50	INDF	22	91	0,2418	3	3	8	0,375
51	INDR	22	91	0,2418	3	1	3	0,33333
52	INDS	22	91	0,2418	3	1	3	0,33333
53	INKP	23	91	0,2527	3	3	7	0,42857
54	INRU	3	91	0,0330	3	2	4	0,5
55	INTP	22	91	0,2418	3	3	6	0,5
56	IPOL	23	91	0,2527	3	1	3	0,33333
57	JECC	19	91	0,2088	3	2	4	0,5
58	JKSW	3	91	0,0330	3	2	5	0,4
59	JPFA	22	91	0,2418	3	2	6	0,33333
60	KAEF	16	91	0,1758	3	1	2	0,5
61	KBLI	18	91	0,1978	4	1	5	0,2
62	KARW	3	91	0,0330	3	2	6	0,33333
63	KBLM	23	91	0,2527	3	1	3	0,33333
64	KBRI	20	91	0,2198	3	1	2	0,5

NO	NAMA PERUSAHAAN	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY			KA	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN		
		CSRSD	CSRI	CSRDI		ADKI	ADK	KDKI
65	KDSI	6	91	0,0659	3	2	4	0,5
66	KIAS	20	91	0,2198	3	2	6	0,33333
67	KICI	10	91	0,1099	3	1	3	0,33333
68	KRAS	30	91	0,3297	3	2	4	0,5
69	KLBF	18	91	0,1978	3	3	7	0,42857
70	LION	20	91	0,2198	3	1	3	0,33333
71	LMPI	9	91	0,0989	3	1	2	0,5
72	LMSH	7	91	0,0769	3	1	3	0,33333
73	LPIN	19	91	0,2088	3	1	3	0,33333
74	MAIN	9	91	0,0989	5	3	5	0,6
75	MASA	9	91	0,0989	3	2	5	0,4
76	MBTO	9	91	0,0989	2	1	3	0,33333
77	MERK	9	91	0,0989	3	1	3	0,33333
78	MLBI	9	91	0,0989	3	3	6	0,5
79	MLIA	8	91	0,0879	3	1	4	0,25
80	MRAT	9	91	0,0989	3	1	3	0,33333
81	MYOR	9	91	0,0989	3	2	5	0,4
82	MYTX	13	91	0,1429	2	1	4	0,25
83	NIKL	10	91	0,1099	3	1	3	0,33333
84	PBRX	9	91	0,0989	3	1	3	0,33333
85	PICO	15	91	0,1648	3	1	3	0,33333
86	POLY	6	91	0,0659	3	2	6	0,33333
87	PRAS	26	91	0,2857	3	1	3	0,33333
88	PTSN	19	91	0,2088	3	1	3	0,33333
89	PSDN	6	91	0,0659	3	2	6	0,33333
90	PYFA	9	91	0,0989	4	2	4	0,5
91	RICY	13	91	0,1429	3	1	3	0,33333
92	RMBA	13	91	0,1429	3	1	3	0,33333
93	ROTI	8	91	0,0879	3	1	3	0,33333
94	SCCO	9	91	0,0989	3	1	3	0,33333
95	SIDO	15	91	0,1648	3	1	3	0,33333
96	SIPD	13	91	0,1429	3	1	3	0,33333
97	SKLT	6	91	0,0659	3	1	3	0,33333
98	SMBR	19	91	0,2088	3	1	5	0,2
99	SMCB	24	91	0,2637	3	3	8	0,375
100	SMGR	43	91	0,4725	5	3	7	0,42857
101	SMSM	20	91	0,2198	3	1	2	0,5
102	SPMA	20	91	0,2198	3	3	5	0,6
103	SRIL	19	91	0,2088	3	1	3	0,33333
104	SRSN	14	91	0,1538	3	3	8	0,375
105	SSTM	14	91	0,1538	3	2	5	0,4
106	STTP	14	91	0,1538	3	1	2	0,5
107	SULI	14	91	0,1538	3	2	4	0,5
108	TBMS	14	91	0,1538	3	2	5	0,4
109	TFCO	14	91	0,1538	3	1	3	0,33333
110	TCID	14	91	0,1538	3	3	6	0,5
111	TIRT	12	91	0,1319	3	1	3	0,33333
112	TKIM	39	91	0,4286	3	3	7	0,42857
113	TOTO	1	91	0,0110	3	2	5	0,4
114	TPIA	18	91	0,1978	3	3	7	0,42857
115	TRIS	19	91	0,2088	3	1	3	0,33333
116	TRST	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333
117	TSPC	18	91	0,1978	3	3	5	0,6
118	ULTJ	18	91	0,1978	3	1	3	0,33333
119	UNIC	19	91	0,2088	3	2	5	0,4
120	UNIT	18	91	0,1978	3	1	2	0,5
121	UNVR	39	91	0,4286	3	2	5	0,4
122	VOKS	19	91	0,2088	3	2	6	0,33333
123	WIIM	19	91	0,2088	3	1	3	0,33333
124	YPAS	19	91	0,2088	3	1	3	0,33333

Pemerintah dan Institusional 2017

NP	KKP			KKI		
	JSP	JSB	KKP	JSI	JSB	KKI
ADES		589.896.800	0	539.896.713	589.896.800	0,91524
ADMG		3.889.179.559	0	3.324.921.010	3.889.179.559	0,85492
AKPI		680.000.000	0	540.458.323	680.000.000	0,79479
ALDO		550.000.000	0	321.230.769	550.000.000	0,58406
ALKA		507.665.055	0	472.476.555	507.665.055	0,93069
ALMI		616.000.000	0	471.142.566	616.000.000	0,76484

NP	KKP			KKI		
	JSP	JSB	KKP	JSI	JSB	KKI
ALTO		2.191.870.558	0	825.344.199	2.191.870.558	0,37655
AMFG		434.000.000	0	177.799.700	434.000.000	0,40968
APLI		1.362.671.400	0	801.304.000	1.362.671.400	0,58804
ARGO		335.557.450	0	184.023.250	335.557.450	0,54841
ARNA		7.341.430.976	0	1.026.150.000	7.341.430.976	0,13978
ASII		40.483.553.140	0	20.288.255.040	40.483.553.140	0,50115
AUTO		4.819.733.000	0	3.855.786.337	4.819.733.000	0,8
BAJA		1.800.000.000	0		1.800.000.000	0
BATA		1.300.000.000	0	1.132.954.500	1.300.000.000	0,8715
BIMA		608.175.716	0	562.532.716	608.175.716	0,92495
BOLT		2.343.750.000	0	1.350.000.000	2.343.750.000	0,576
BRAM		450.000.000	0	298.384.682	450.000.000	0,66308
BRNA		979.110.000	0	534.252.162	979.110.000	0,54565
BRPT		13.959.785.568	0	266.413.800	13.959.785.568	0,01908
BTON		720.000.000	0	14.138.000	720.000.000	0,01964
BUDI		4.498.997.362	0	2.402.568.831	4.498.997.362	0,53402
CEKA		595.000.000	0	517.771.000	595.000.000	0,8702
CLPI		306.338.500	0	178.985.300	306.338.500	0,58427
CNTX		200.000.000	0	181.549.000	200.000.000	0,90775
CPIN		16.398.000.000	0	9.106.385.410	16.398.000.000	0,55534
CTBN		800.371.500	0	709.846.300	800.371.500	0,8869
DLTA	186.846.000	800.659.050	0,23337	467.061.150	800.659.050	0,58335
DVLA		1.120.000.000	0	1.031.800.912	1.120.000.000	0,92125
EKAD		698.775.000	0	536.712.320	698.775.000	0,76808
ERTX		1.286.539.792	0	1.227.082.192	1.286.539.792	0,95378
ESTI		2.015.208.720	0	1.751.033.353	2.015.208.720	0,86891
FASW		2.477.888.787	0	1.856.242.100	2.477.888.787	0,74912
FPNI		5.566.414.000	0	5.148.902.750	5.566.414.000	0,92499
GDYR		410.000.000	0	348.500.000	410.000.000	0,85
GDST		8.200.000.000	0	196.219.400	8.200.000.000	0,02393
GGRM		1.924.088.000	0	1.453.589.500	1.924.088.000	0,75547
GJTL		3.484.800.000	0	2.073.452.443	3.484.800.000	0,595
HDTX		3.601.462.800	0	3.285.372.360	3.601.462.800	0,91223
HMSP		116.318.076.900	0	107.594.221.125	116.318.076.900	0,925
ICBP		11.661.908.000	0	9.391.678.000	11.661.908.000	0,80533
IGAR		972.204.500	0	824.612.420	972.204.500	0,84819
IKAI		12.096.181.261	0	5.769.448.266	12.096.181.261	0,47696
IKBI		1.224.000.000	0	1.128.486.000	1.224.000.000	0,92197
IMAS		2.765.278.412	0	2.479.277.424	2.765.278.412	0,89657
IMPC		4.833.500.000	0	4.317.042.954	4.833.500.000	0,89315
INAF	2.500.000.000	3.099.267.500	0,80664	199.996.500	3.099.267.500	0,06453
INAI		181.035.556	0		181.035.556	0
INCI		196.121.237	0		196.121.237	0
INDF		8.780.426.500	0	4.396.103.450	8.780.426.500	0,50067
INDR		654.351.707	0	351.473.114	654.351.707	0,53713
INDS		656.249.710	0	578.210.207	656.249.710	0,88108
INKP		5.470.982.941	0	2.884.473.498	5.470.982.941	0,52723
INRU		1.388.883.283	0	1.283.649.894	1.388.883.283	0,92423
INTP		3.681.231.699	0	1.877.480.863	3.681.231.699	0,51001
IPOL		6.443.379.509	0	5.062.818.980	6.443.379.509	0,78574
JECC		7.071.923.935	0	4.020.063.930	7.071.923.935	0,56845
JKSW		151.200.000	0	136.303.300	151.200.000	0,90148
JPFA		11.410.522.910	0	7.186.031.335	11.410.522.910	0,62977
KAEF		150.000.000	0	88.847.000	150.000.000	0,59231
KBLI	5.000.000.000	5.554.000.000	0,90025	5.000.000.000	5.554.000.000	0,90025
KARW		4.007.235.107	0	2.304.962.599	4.007.235.107	0,5752

NP	KKP			KKI		
	JSP	JSB	KKP	JSI	JSB	KKI
KBLM		1.120.000.000	0	847.095.400	1.120.000.000	0,75634
KBRI		8.687.995.734	0	6.515.996.801	8.687.995.734	0,75
KDSI		405.000.000	0	317.691.000	405.000.000	0,78442
KIAS		14.929.100.000	0	14.666.550.953	14.929.100.000	0,98241
KICI		276.000.000	0	230.059.680	276.000.000	0,83355
KRAS		1.428.571.500	0	1.141.221.900	1.428.571.500	0,79886
KLBF		46.875.122.110	0	26.614.076.385	46.875.122.110	0,56777
LION		520.016.000	0	300.120.000	520.016.000	0,57714
LMPI		1.008.517.669	0	179.313.291	1.008.517.669	0,1778
LMSH		96.000.000	0	30.927.000	96.000.000	0,32216
LPIN		106.250.000	0	86.811.600	106.250.000	0,81705
MAIN		2.238.750.000	0	1.282.143.142	2.238.750.000	0,5727
MASA		9.182.946.945	0	2.899.632.000	9.182.946.945	0,31576
MBTO		1.070.000.000	0	724.928.500	1.070.000.000	0,6775
MERK		448.000.000	0	388.194.920	448.000.000	0,86651
MLBI		2.107.000.000	0	1.723.151.000	2.107.000.000	0,81782
MLIA		1.271.994.200	0	889.685.722	1.271.994.200	0,69944
MRAT		428.000.000	0	343.122.800	428.000.000	0,80169
MYOR		22.358.699.725	0	13.207.471.425	22.358.699.725	0,59071
MYTX		1.466.666.577	0	1.169.360.540	1.466.666.577	0,79729
NIKL		2.523.350.000	0	2.131.776.450	2.523.350.000	0,84482
PBRX		6.478.295.611	0	3.099.345.123	6.478.295.611	0,47842
PICO		568.375.000	0	534.338.000	568.375.000	0,94012
POLY		2.495.753.347	0	1.575.200.101	2.495.753.347	0,63115
PRAS		701.043.478	0	379.043.478	701.043.478	0,54068
PTSN		1.771.448.000	0	177.144.800	1.771.448.000	0,1
PSDN		1.440.000.000	0	947.660.545	1.440.000.000	0,6581
PYFA		535.080.000	0	288.119.974	535.080.000	0,53846
RICY		641.717.510	0	308.287.600	641.717.510	0,48041
RMBA		36.401.136.250	0	36.317.403.116	36.401.136.250	0,9977
ROTI		6.186.488.888	0	4.348.028.207	6.186.488.888	0,70283
SCCO		205.583.400	0	122.000.000	205.583.400	0,59343
SIDO		15.000.000.000	0	12.150.000.000	15.000.000.000	0,81
SIPD		1.339.102.579	0	1.141.517.065	1.339.102.579	0,85245
SKLT		690.740.500	0	663.740.500	690.740.500	0,96091
SMBR	7.500.000.000	9.837.678.500	0,76237		9.837.678.500	0
SMCB		7.662.900.000	0	6.179.612.820	7.662.900.000	0,80643
SMGR	3.025.406	5.931.520	0,51006		5.931.520	0
SMSM		5.758.675.440	0	3.347.263.708	5.758.675.440	0,58126
SPMA		2.114.570.958	0	1.764.759.797	2.114.570.958	0,83457
SRIL		20.452.176.844	0	12.072.841.076	20.452.176.844	0,5903
SRSN		6.020.000.000	0	1.974.198.800	6.020.000.000	0,32794
SSTM		1.170.909.181	0	480.000.000	1.170.909.181	0,40994
STTP		1.310.000.000	0	743.600.500	1.310.000.000	0,56763
SULI		3.986.916.802	0	1.309.880.219	3.986.916.802	0,32854
TBMS		367.340.000	0	316.763.000	367.340.000	0,86232
TFCO		4.823.076.400	0	3.243.290.132	4.823.076.400	0,67245
TCID		201.066.667	0	148.438.129	201.066.667	0,73825
TIRT		1.011.774.750	0	789.633.654	1.011.774.750	0,78044
TKIM		3.113.223.570	0	1.857.744.987	3.113.223.570	0,59673
TOTO		10.320.000.000	0	9.531.686.400	10.320.000.000	0,92361
TPIA		17.833.520.260	0	13.700.443.835	17.833.520.260	0,76824
TRIS		1.047.587.802	0	700.000.000	1.047.587.802	0,6682
TRST		2.808.000.000	0	1.622.167.825	2.808.000.000	0,5777
TSPC		4.500.000.000	0	3.551.607.218	4.500.000.000	0,78925
ULTJ		11.553.528.000	0	4.258.588.260	11.553.528.000	0,3686

NP	KKP			KKI		
	JSP	JSB	KKP	JSI	JSB	KKI
UNIC		383.331.363	0	222.647.461	383.331.363	0,58082
UNIT		75.422.200	0	41.323.425	75.422.200	0,54789
UNVR		7.630.000.000	0	6.484.877.500	7.630.000.000	0,84992
VOKS		4.155.602.595	0	1.666.510.165	4.155.602.595	0,40103
WIIM		2.099.873.760	0	108.000.000	2.099.873.760	0,05143
YPAS		668.000.089	0	597.650.500	668.000.089	0,89469

Keluarga dan Asing 2017

NP	KKK			KKA		
	JSK	JSB	KKK	JSA	JSB	KKA
ADES		589.896.800	0	539.896.713	589.896.800	0,91524
ADMG		3.889.179.559	0	1.925.414.417	3.889.179.559	0,49507
AKPI		680.000.000	0		680.000.000	0
ALDO		550.000.000	0		550.000.000	0
ALKA		507.665.055	0		507.665.055	0
ALMI		616.000.000	0		616.000.000	0
ALTO	49.000.000	2.191.870.558	0,02236		2.191.870.558	0
AMFG		434.000.000	0	190.359.000	434.000.000	0,43862
APLI	364.209.148	1.362.671.400	0,26728		1.362.671.400	0
ARGO		335.557.450	0	34.738.750	335.557.450	0,10353
ARNA	2.740.000.000	7.341.430.976	0,37322		7.341.430.976	0
ASII		40.483.553.140	0	20.288.255.040	40.483.553.140	0,50115
AUTO		4.819.733.000	0	3.855.786.337	4.819.733.000	0,8
BAJA	1.400.080.000	1.800.000.000	0,77782		1.800.000.000	0
BATA		1.300.000.000	0	1.132.954.500	1.300.000.000	0,8715
BIMA		608.175.716	0		608.175.716	0
BOLT	525.000.000	2.343.750.000	0,224		2.343.750.000	0
BRAM	129.934.471	450.000.000	0,28874	273.153.182	450.000.000	0,60701
BRNA	70.776.900	979.110.000	0,07229		979.110.000	0
BRPT	9.937.629.472	13.959.785.568	0,71188		13.959.785.568	0
BTON	644.000.000	720.000.000	0,89444		720.000.000	0
BUDI		4.498.997.362	0		4.498.997.362	0
CEKA		595.000.000	0	29.700.000	595.000.000	0,04992
CLPI	20.364.500	306.338.500	0,06648	156.230.000	306.338.500	0,50999
CNTX		200.000.000	0	137.310.000	200.000.000	0,68655
CPIN		16.398.000.000	0	526.300	16.398.000.000	3,2E-05
CTBN		800.371.500	0	709.846.300	800.371.500	0,8869
DLTA		800.659.050	0	467.061.150	800.659.050	0,58335
DVLA		1.120.000.000	0	1.031.800.912	1.120.000.000	0,92125
EKAD		698.775.000	0		698.775.000	0
ERTX		1.286.539.792	0		1.286.539.792	0
ESTI		2.015.208.720	0		2.015.208.720	0
FASW		2.477.888.787	0		2.477.888.787	0
FPNI		5.566.414.000	0	5.148.902.750	5.566.414.000	0,92499
GDYR		410.000.000	0	348.500.000	410.000.000	0,85
GDST	7.159.870.000	8.200.000.000	0,87315		8.200.000.000	0
GGRM	17.702.200	1.924.088.000	0,0092		1.924.088.000	0
GJTL		3.484.800.000	0	2.073.452.443	3.484.800.000	0,595
HDTX		3.601.462.800	0	2.760.880.100	3.601.462.800	0,7666
HMSP		116.318.076.900	0		116.318.076.900	0
ICBP		11.661.908.000	0		11.661.908.000	0
IGAR		972.204.500	0		972.204.500	0
IKAI		12.096.181.261	0	2.477.369.656	12.096.181.261	0,20481
IKBI		1.224.000.000	0	1.128.486.000	1.224.000.000	0,92197
IMAS		2.765.278.412	0	1.976.765.774	2.765.278.412	0,71485
IMPC		4.833.500.000	0		4.833.500.000	0

NP	KKK			KKA		
	JSK	JSB	KKK	JSA	JSB	KKA
INAF		3.099.267.500	0		3.099.267.500	0
INAI	88.476.608	181.035.556	0,48873		181.035.556	0
INCI	95.915.307	196.121.237	0,48906		196.121.237	0
INDF		8.780.426.500	0	4.396.103.450	8.780.426.500	0,50067
INDR		654.351.707	0		654.351.707	0
INDS		656.249.710	0		656.249.710	0
INKP		5.470.982.941	0		5.470.982.941	0
INRU		1.388.883.283	0	1.283.649.894	1.388.883.283	0,92423
INTP		3.681.231.699	0	1.877.480.863	3.681.231.699	0,51001
IPOL		6.443.379.509	0	3.395.064.270	6.443.379.509	0,52691
JECC		7.071.923.935	0		7.071.923.935	0
JKSW		151.200.000	0	30.240.000	151.200.000	0,2
JPFA		11.410.522.910	0	7.186.031.335	11.410.522.910	0,62977
KAEF		150.000.000	0	2.000.000	150.000.000	0,01333
KBLI		5.554.000.000	0		5.554.000.000	0
KARW		4.007.235.107	0	2.304.962.599	4.007.235.107	0,5752
KBLM		1.120.000.000	0	180.000.000	1.120.000.000	0,16071
KBRI		8.687.995.734	0	6.515.996.801	8.687.995.734	0,75
KDSI	22.276.200	405.000.000	0,055		405.000.000	0
KIAS		14.929.100.000	0	14.378.410.753	14.929.100.000	0,96311
KICI		276.000.000	0	230.059.680	276.000.000	0,83355
KRAS	150.990.000	1.428.571.500	0,10569	148.364.800	1.428.571.500	0,10386
KLBF		46.875.122.110	0		46.875.122.110	0
LION		520.016.000	0	300.120.000	520.016.000	0,57714
LMPI	688.570.411	1.008.517.669	0,68275		1.008.517.669	0
LMSH	24.565.000	96.000.000	0,25589	30.927.000	96.000.000	0,32216
LPIN		106.250.000	0		106.250.000	0
MAIN		2.238.750.000	0	1.282.143.142	2.238.750.000	0,5727
MASA	1.891.295.999	9.182.946.945	0,20596	2.899.632.000	9.182.946.945	0,31576
MBTO		1.070.000.000	0		1.070.000.000	0
MERK		448.000.000	0		448.000.000	0
MLBI		2.107.000.000	0	1.723.151.000	2.107.000.000	0,81782
MLIA	109.021.300	1.271.994.200	0,08571		1.271.994.200	0
MRAT		428.000.000	0		428.000.000	0
MYOR	5.638.834.400	22.358.699.725	0,2522		22.358.699.725	0
MYTX		1.466.666.577	0		1.466.666.577	0
NIKL		2.523.350.000	0	1.387.842.500	2.523.350.000	0,55
PBRX		6.478.295.611	0		6.478.295.611	0
PICO		568.375.000	0	272.875.000	568.375.000	0,4801
POLY		2.495.753.347	0	1.443.805.382	2.495.753.347	0,5785
PRAS		701.043.478	0	113.043.478	701.043.478	0,16125
PTSN	1.240.060.000	1.771.448.000	0,70003		1.771.448.000	0
PSDN	272.378.790	1.440.000.000	0,18915		1.440.000.000	0
PYFA	160.289.311	535.080.000	0,29956		535.080.000	0
RICY	35.114.500	641.717.510	0,05472	209.095.500	641.717.510	0,32584
RMBA		36.401.136.250	0	36.317.403.116	36.401.136.250	0,9977
ROTI		6.186.488.888	0	2.753.561.207	6.186.488.888	0,44509
SCCO		205.583.400	0	24.275.640	205.583.400	0,11808
SIDO		15.000.000.000	0		15.000.000.000	0
SIPD		1.339.102.579	0		1.339.102.579	0
SKLT		690.740.500	0	396.386.250	690.740.500	0,57386
SMBR		9.837.678.500	0		9.837.678.500	0
SMCB		7.662.900.000	0	6.197.612.820	7.662.900.000	0,80878
SMGR		5.931.520	0		5.931.520	0
SMSM		5.758.675.440	0		5.758.675.440	0
SPMA		2.114.570.958	0	769.058.900	2.114.570.958	0,3637

NP	KKK			KKA		
	JSK	JSB	KKK	JSA	JSB	KKA
SRIL		20.452.176.844	0		20.452.176.844	0
SRSN	3.039.953.512	6.020.000.000	0,50498		6.020.000.000	0
SSTM	414.511.265	1.170.909.181	0,35401		1.170.909.181	0
STTP		1.310.000.000	0		1.310.000.000	0
SULI	1.523.442.282	3.986.916.802	0,38211	1.309.880.219	3.986.916.802	0,32854
TBMS		367.340.000	0	316.763.000	367.340.000	0,86232
TFCO		4.823.076.400	0		4.823.076.400	0
TCID		201.066.667	0	122.319.485	201.066.667	0,60835
TIRT		1.011.774.750	0		1.011.774.750	0
TKIM		3.113.223.570	0		3.113.223.570	0
TOTO		10.320.000.000	0	3.911.546.800	10.320.000.000	0,37903
TPIA	2.633.449.995	17.833.520.260	0,14767	13.700.443.835	17.833.520.260	0,76824
TRIS		1.047.587.802	0		1.047.587.802	0
TRST		2.808.000.000	0		2.808.000.000	0
TSPC		4.500.000.000	0		4.500.000.000	0
ULTJ	3.986.948.900	11.553.528.000	0,34508		11.553.528.000	0
UNIC		383.331.363	0	222.647.461	383.331.363	0,58082
UNIT		75.422.200	0	41.323.425	75.422.200	0,54789
UNVR		7.630.000.000	0	6.484.877.500	7.630.000.000	0,84992
VOKS	738.552.585	4.155.602.595	0,17772	1.666.510.165	4.155.602.595	0,40103
WIIM	1.291.935.117	2.099.873.760	0,61524		2.099.873.760	0
YPAS		668.000.089	0		668.000.089	0

Keterangan :

NP : Nama Perusahaan

CSR : *Corporate Social Responsibility*

CSRDi : *Corporate Social Responsibility Disclosure*

CSRI : *Corporate Social Responsibility index*

CSRDi : *Corporate Social Responsibility Disclosure per index*

KA : Komite Audit

ADKI : Anggota Dewan Komisaris Independen

ADK : Anggota Dewan Komisaris

KDKI : Komposisi Dewan Komisaris Independen

KKP : Komposisi Kepemilikan Pemerintah

JSP : Jumlah Saham Pemerintah

KKI : Komposisi Kepemilikan Institusional

JSI : Jumlah Saham Institusional

KKK : Komposisi Kepemilikan Keluarga

JSK : Jumlah Saham Keluarga

KKA : Komposisi Kepemilikan Asing

JSA : Jumlah Saham Asing

JSB : Jumlah Saham Beredar

LAMPIRAN 5
NILAI SETIAP VARIABEL
TAHUN 2018

CSR, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen 2018

NO	NAMA PERUSAHAAN	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY			KA	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN		
		CSRSD	CSRi	CSRDi		ADKI	ADK	KDKI
1	ADES	11	91	0,1209	3	1	3	0,33333
2	ADMG	16	91	0,1758	3	1	4	0,2
3	AKPI	13	91	0,1429	3	2	6	0,33333
4	ALDO	16	91	0,1758	3	1	3	0,33333
5	ALKA	13	91	0,1429	3	1	3	0,33333
6	ALMI	10	91	0,1099	3	1	3	0,33333
7	ALTO	20	91	0,2198	3	1	2	0,5
8	AMFG	15	91	0,1648	3	2	6	0,33333
9	APLI	16	91	0,1758	3	1	3	0,5
10	ARGO	13	91	0,1429	3	2	6	0,4
11	ARNA	14	91	0,1538	3	2	4	0,5
12	ASII	40	91	0,4396	4	4	11	0,3
13	AUTO	40	91	0,4396	3	3	8	0,375
14	BAJA	20	91	0,2198	3	1	3	0,33333
15	BATA	16	91	0,1758	3	2	4	0,33333
16	BIMA	16	91	0,1758	3	2	3	0,66667
17	BOLT	20	91	0,2198	3	1	3	0,33333
18	BRAM	13	91	0,1429	3	2	5	0,4
19	BRNA	16	91	0,1758	3	2	5	0,4
20	BRPT	7	91	0,0769	3	1	3	0,33333
21	BTON	22	91	0,2418	3	1	2	0,5
22	BUDI	26	91	0,2857	3	1	3	0,33333
23	CEKA	16	91	0,1758	3	2	4	0,5
24	CLPI	13	91	0,1429	3	1	3	0,33333
25	CNTX	20	91	0,2198	3	1	3	0,33333
26	CPIN	8	91	0,0879	3	1	3	0,33333
27	CTBN	8	91	0,0879	3	2	6	0,33333
28	DLTA	5	91	0,0549	3	2	5	0,4
29	DVLA	23	91	0,2527	3	3	7	0,42857
30	EKAD	3	91	0,0330	3	1	3	0,33333
31	ERTX	23	91	0,2527	3	1	3	0,33333
32	ESTI	23	91	0,2527	3	1	2	0,5
33	FASW	22	91	0,2418	3	2	5	0,4
34	FPNI	26	91	0,2857	3	1	2	0,5
35	GDYR	26	91	0,2857	3	1	3	0,33333
36	GDST	5	91	0,0549	3	1	2	0,33333
37	GGRM	22	91	0,2418	3	2	4	0,5
38	GJTL	3	91	0,0330	3	2	9	0,2
39	HDTX	22	91	0,2418	3	1	3	0,33333
40	HMSP	22	91	0,2418	3	3	6	0,42857
41	ICBP	16	91	0,1758	3	3	6	0,5
42	IGAR	5	91	0,0549	3	1	3	0,33333
43	IKAI	5	91	0,0549	3	1	2	0,33333
44	IKBI	20	91	0,2198	3	1	3	0,33333
45	IMAS	22	91	0,2418	3	3	6	0,5
46	IMPC	20	91	0,2198	3	1	2	0,5
47	INAF	22	91	0,2418	3	1	3	0,33333
48	INAI	4	91	0,0440	3	1	3	0,33333
49	INCI	22	91	0,2418	3	1	3	0,33333
50	INDF	22	91	0,2418	3	3	8	0,375
51	INDR	22	91	0,2418	3	1	3	0,33333
52	INDS	22	91	0,2418	3	1	3	0,33333
53	INKP	23	91	0,2527	3	3	7	0,42857
54	INRU	3	91	0,0330	3	2	4	0,5
55	INTP	23	91	0,2527	3	3	6	0,33333
56	IPOL	23	91	0,2527	3	1	3	0,33333
57	JECC	20	91	0,2198	3	2	4	0,5
58	JKSW	3	91	0,0330	3	2	5	0,4
59	JPFA	23	91	0,2527	3	2	6	0,33333
60	KAEF	16	91	0,1758	3	1	2	0,5
61	KBLI	18	91	0,1978	4	1	5	0,4
62	KARW	3	91	0,0330	3	2	6	0,33333
63	KBLM	23	91	0,2527	3	1	3	0,66667
64	KBRI	6	91	0,0659	2	1	2	0,5

NO	NAMA PERUSAHAAN	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY			KA	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN		
		CSRD	CSRI	CSRDI		ADKI	ADK	KDKI
65	KDSI	6	91	0,0659	3	2	4	0,33333
66	KIAS	23	91	0,2527	3	2	6	0,33333
67	KICI	10	91	0,1099	3	1	3	0,33333
68	KRAS	31	91	0,3407	3	1	5	0,5
69	KLBF	18	91	0,1978	3	2	6	0,33333
70	LION	20	91	0,2198	3	1	3	0,33333
71	LMPI	9	91	0,0989	3	1	3	0,5
72	LMSH	7	91	0,0769	3	1	3	0,33333
73	LPIN	20	91	0,2198	3	1	2	0,33333
74	MAIN	9	91	0,0989	5	2	6	0,6
75	MASA	9	91	0,0989	3	1	2	0,4
76	MBTO	9	91	0,0989	2	2	5	0,33333
77	MERK	9	91	0,0989	3	2	4	0,5
78	MLBI	26	91	0,2857	3	3	10	0,5
79	MLIA	9	91	0,0989	3	3	8	0,25
80	MRAT	9	91	0,0989	3	1	3	0,33333
81	MYOR	9	91	0,0989	3	1	3	0,4
82	MYTX	13	91	0,1429	3	2	3	0,33333
83	NIKL	10	91	0,1099	3	1	3	0,33333
84	PBRX	9	91	0,0989	3	2	5	0,33333
85	PICO	15	91	0,1648	3	2	5	0,33333
86	POLY	6	91	0,0659	3	1	3	0,33333
87	PRAS	26	91	0,2857	3	1	2	0,33333
88	PTSN	19	91	0,2088	3	1	3	0,33333
89	PSDN	6	91	0,0659	3	2	4	0,33333
90	PYFA	9	91	0,0989	4	1	3	0,5
91	RICY	13	91	0,1429	3	1	3	0,33333
92	RMBA	25	91	0,2747	3	1	3	0,33333
93	ROTI	9	91	0,0989	3	2	6	0,33333
94	SCCO	9	91	0,0989	3	2	5	0,33333
95	SIDO	15	91	0,1648	3	3	7	0,4
96	SIPD	13	91	0,1429	3	1	3	0,33333
97	SKLT	20	91	0,2198	3	1	3	0,33333
98	SMBR	20	91	0,2198	3	1	2	0,4
99	SMCB	25	91	0,2747	3	2	5	0,375
100	SMGR	44	91	0,4835	5	1	2	0,42857
101	SMSM	19	91	0,2088	3	1	3	0,5
102	SPMA	19	91	0,2088	3	1	3	0,6
103	SRIL	20	91	0,2198	3	2	4	0,33333
104	SRSN	15	91	0,1648	3	2	10	0,375
105	SSTM	15	91	0,1648	3	1	3	0,4
106	STTP	15	91	0,1648	3	3	7	0,5
107	SULI	15	91	0,1648	3	3	6	0,5
108	TBMS	15	91	0,1648	3	1	3	0,4
109	TFCO	15	91	0,1648	3	1	3	0,5
110	TCID	15	91	0,1648	3	1	3	0,4
111	TIRT	12	91	0,1319	3	3	6	0,5
112	TKIM	40	91	0,4396	3	1	2	0,5
113	TOTO	1	91	0,0110	3	1	3	0,4
114	TPIA	19	91	0,2088	3	1	3	0,42857
115	TRIS	20	91	0,2198	3	1	3	0,33333
116	TRST	19	91	0,2088	3	3	8	0,33333
117	TSPC	19	91	0,2088	3	1	3	0,6
118	ULTJ	19	91	0,2088	3	1	3	0,33333
119	UNIC	20	91	0,2198	3	3	7	0,4
120	UNIT	19	91	0,2088	3	2	4	0,5
121	UNVR	40	91	0,4396	3	2	6	0,4
122	VOKS	20	91	0,2198	3	1	3	0,33333
123	WIIM	20	91	0,2198	3	2	4	0,33333
124	YPAS	20	91	0,2198	3	2	5	0,33333

Pemerintah dan Institusional 2018

NP	KKP			KKI		
	JSP	JSB	KKP	JSI	JSB	KKI
ADES		589.896.800	0	539.896.713	589.896.800	0,91524
ADMG		3.889.179.559	0	3.324.921.010	3.889.179.559	0,85492
AKPI		680.000.000	0	540.458.323	680.000.000	0,79479
ALDO		550.000.000	0	321.230.769	550.000.000	0,58406
ALKA		507.665.055	0	472.476.555	507.665.055	0,93069
ALMI		616.000.000	0	471.142.566	616.000.000	0,76484

NP	KKP			KKI		
	JSP	JSB	KKP	JSI	JSB	KKI
ALTO		2.191.870.558	0	825.344.199	2.191.870.558	0,37655
AMFG		434.000.000	0	177.799.700	434.000.000	0,40968
APLI		1.362.671.400	0	801.304.000	1.362.671.400	0,58804
ARGO		335.557.450	0	184.023.250	335.557.450	0,54841
ARNA		7.341.430.976	0	1.026.388.000	7.341.430.976	0,13981
ASII		40.483.553.140	0	20.288.255.040	40.483.553.140	0,50115
AUTO		4.819.733.000	0	3.855.786.337	4.819.733.000	0,8
BAJA		1.800.000.000	0		1.800.000.000	0
BATA		1.300.000.000	0	1.132.954.500	1.300.000.000	0,8715
BIMA		608.175.716	0	526.475.716	608.175.716	0,86566
BOLT		2.343.750.000	0	1.350.000.000	2.343.750.000	0,576
BRAM		450.000.000	0	312.384.682	450.000.000	0,69419
BRNA		979.110.000	0	534.252.162	979.110.000	0,54565
BRPT		17.791.586.878	0	289.646.300	17.791.586.878	0,01628
BTON		720.000.000	0		720.000.000	0
BUDI		4.498.997.362	0	2.402.568.831	4.498.997.362	0,53402
CEKA		595.000.000	0	517.771.000	595.000.000	0,8702
CLPI		306.338.500	0	178.985.300	306.338.500	0,58427
CNTX		200.000.000	0	181.549.000	200.000.000	0,90775
CPIN		16.398.000.000	0	9.106.385.410	16.398.000.000	0,55534
CTBN		800.371.500	0	709.846.300	800.371.500	0,8869
DLTA	186.846.000	800.659.050	0,23337	467.061.150	800.659.050	0,58335
DVLA		1.120.000.000	0	1.031.800.912	1.120.000.000	0,92125
EKAD		698.775.000	0	541.781.720	698.775.000	0,77533
ERTX		1.286.539.792	0	1.188.582.192	1.286.539.792	0,92386
ESTI		2.015.208.720	0	1.751.033.353	2.015.208.720	0,86891
FASW		2.477.888.787	0	1.856.242.100	2.477.888.787	0,74912
FPNI		5.566.414.000	0	5.148.902.750	5.566.414.000	0,92499
GDYR		410.000.000	0	348.500.000	410.000.000	0,85
GDST		9.242.500.000	0	180.000.000	9.242.500.000	0,01948
GGRM		1.924.088.000	0	1.453.589.500	1.924.088.000	0,75547
GJTL		3.484.800.000	0	2.073.452.443	3.484.800.000	0,595
HDTX		3.601.462.800	0	3.285.372.360	3.601.462.800	0,91223
HMSP		116.318.076.900	0	107.594.221.125	116.318.076.900	0,925
ICBP		11.661.908.000	0	9.391.678.000	11.661.908.000	0,80533
IGAR		972.204.500	0	824.612.420	972.204.500	0,84819
IKAI		12.096.181.261	0	5.769.448.266	12.096.181.261	0,47696
IKBI		1.224.000.000	0	1.128.486.000	1.224.000.000	0,92197
IMAS		2.765.278.412	0	2.479.277.424	2.765.278.412	0,89657
IMPC		4.833.500.000	0	2.225.225.309	4.833.500.000	0,46038
INAF	2.500.000.000	3.099.267.500	0,80664	227.533.850	3.099.267.500	0,07342
INAI		196.121.237	0		196.121.237	0
INCI		196.121.237	0		196.121.237	0
INDF		8.780.426.500	0	4.396.103.450	8.780.426.500	0,50067
INDR		654.351.707	0	386.264.314	654.351.707	0,5903
INDS		656.249.710	0	578.210.207	656.249.710	0,88108
INKP		5.470.982.941	0	2.898.928.298	5.470.982.941	0,52987
INRU		1.388.883.283	0	1.283.649.894	1.388.883.283	0,92423
INTP		3.681.231.699	0	1.877.480.863	3.681.231.699	0,51001
IPOL		6.443.379.509	0	5.221.211.480	6.443.379.509	0,81032
JECC		7.071.923.935	0	4.020.063.930	7.071.923.935	0,56845
JKSW		151.200.000	0	136.303.300	151.200.000	0,90148
JPFA		11.726.575.201	0	7.514.780.366	11.726.575.201	0,64083
KAEF		150.000.000	0	88.847.000	150.000.000	0,59231
KBLI	5.000.000.000	5.554.000.000	0,90025	5.000.000.000	5.554.000.000	0,90025
KARW		4.007.235.107	0	2.304.962.599	4.007.235.107	0,5752

NP	KKP			KKI		
	JSP	JSB	KKP	JSI	JSB	KKI
KBLM		1.120.000.000	0	847.095.400	1.120.000.000	0,75634
KBRI		8.687.995.734	0	6.515.996.801	8.687.995.734	0,75
KDSI		405.000.000	0	317.691.000	405.000.000	0,78442
KIAS		14.929.100.000	0	14.666.550.953	14.929.100.000	0,98241
KICI		276.000.000	0	243.105.780	276.000.000	0,88082
KRAS		1.428.571.500	0	1.146.112.800	1.428.571.500	0,80228
KLBF		46.875.122.110	0	26.702.656.085	46.875.122.110	0,56966
LION		520.016.000	0	300.120.000	520.016.000	0,57714
LMPI		1.008.517.669	0	179.313.291	1.008.517.669	0,1778
LMSH		96.000.000	0	30.927.000	96.000.000	0,32216
LPIN		106.250.000	0	86.811.600	106.250.000	0,81705
MAIN		2.238.750.000	0	1.282.143.142	2.238.750.000	0,5727
MASA		9.182.946.945	0	2.899.632.000	9.182.946.945	0,31576
MBTO		1.070.000.000	0	724.928.500	1.070.000.000	0,6775
MERK		448.000.000	0	388.194.920	448.000.000	0,86651
MLBI		2.107.000.000	0	1.723.151.000	2.107.000.000	0,81782
MLIA		1.271.994.200	0	889.685.722	1.271.994.200	0,69944
MRAT		428.000.000	0	343.122.800	428.000.000	0,80169
MYOR		22.358.699.725	0	13.207.471.425	22.358.699.725	0,59071
MYTX		1.466.666.577	0	1.169.360.540	1.466.666.577	0,79729
NIKL		2.523.350.000	0	2.131.776.450	2.523.350.000	0,84482
PBRX		6.478.295.611	0	3.488.035.345	6.478.295.611	0,53842
PICO		568.375.000	0	534.338.000	568.375.000	0,94012
POLY		2.495.753.347	0	1.575.200.101	2.495.753.347	0,63115
PRAS		701.043.478	0	379.043.478	701.043.478	0,54068
PTSN		1.771.448.000	0	177.144.800	1.771.448.000	0,1
PSDN		1.440.000.000	0	947.660.545	1.440.000.000	0,6581
PYFA		535.080.000	0	288.119.974	535.080.000	0,53846
RICY		641.717.510	0	308.287.600	641.717.510	0,48041
RMBA		36.401.136.250	0	36.317.403.116	36.401.136.250	0,9977
ROTI		6.186.488.888	0	4.523.028.207	6.186.488.888	0,73111
SCCO		205.583.400	0	122.000.000	205.583.400	0,59343
SIDO		15.000.000.000	0	12.150.000.000	15.000.000.000	0,81
SIPD		1.339.102.579	0	1.153.939.565	1.339.102.579	0,86173
SKLT		690.740.500	0	663.740.500	690.740.500	0,96091
SMBR	7.500.000.000	9.837.678.500	0,76237		9.837.678.500	0
SMCB		7.662.900.000	0	6.179.612.820	7.662.900.000	0,80643
SMGR	3.025.406	5.931.520	0,51006		5.931.520	0
SMSM		5.758.675.440	0	3.347.263.708	5.758.675.440	0,58126
SPMA		2.114.570.958	0	1.953.225.197	2.114.570.958	0,9237
SRIL		20.452.176.844	0	12.072.841.076	20.452.176.844	0,5903
SRSN		6.020.000.000	0	1.974.198.800	6.020.000.000	0,32794
SSTM		1.170.909.181	0	480.000.000	1.170.909.181	0,40994
STTP		1.310.000.000	0	743.600.500	1.310.000.000	0,56763
SULI		3.986.916.802	0	1.122.031.819	3.986.916.802	0,28143
TBMS		367.340.000	0	316.763.000	367.340.000	0,86232
TFCO		4.823.076.400	0	3.243.290.132	4.823.076.400	0,67245
TCID		201.066.667	0	148.438.129	201.066.667	0,73825
TIRT		1.011.774.750	0	789.633.654	1.011.774.750	0,78044
TKIM		3.113.223.570	0	1.857.744.987	3.113.223.570	0,59673
TOTO		10.320.000.000	0	9.531.686.400	10.320.000.000	0,92361
TPIA		17.833.520.260	0	13.700.443.835	17.833.520.260	0,76824
TRIS		1.047.587.802	0	983.300.000	1.047.587.802	0,93863
TRST		2.808.000.000	0	1.622.167.825	2.808.000.000	0,5777
TSPC		4.500.000.000	0	3.595.726.618	4.500.000.000	0,79905
ULTJ		11.553.528.000	0	4.193.338.260	11.553.528.000	0,36295

NP	KKP			KKI		
	JSP	JSB	KKP	JSI	JSB	KKI
UNIC		383.331.363	0	222.647.461	383.331.363	0,58082
UNIT		75.422.200	0	41.323.425	75.422.200	0,54789
UNVR		7.630.000.000	0	6.484.877.500	7.630.000.000	0,84992
VOKS		4.155.602.595	0	1.666.510.165	4.155.602.595	0,40103
WIIM		2.099.873.760	0	116.000.000	2.099.873.760	0,05524
YPAS		668.000.089	0	597.650.500	668.000.089	0,89469

Keluarga dan Asing 2018

NP	KKK			KKA		
	JSK	JSB	KKK	JSA	JSB	KKA
ADES		589.896.800	0	539.896.713	589.896.800	0,91524
ADMG		3.889.179.559	0	1.925.414.417	3.889.179.559	0,49507
AKPI		680.000.000	0		680.000.000	0
ALDO		550.000.000	0		550.000.000	0
ALKA		507.665.055	0		507.665.055	0
ALMI		616.000.000	0		616.000.000	0
ALTO	49.000.000	2.191.870.558	0,02236		2.191.870.558	0
AMFG		434.000.000	0	190.359.000	434.000.000	0,43862
APLI	364.209.148	1.362.671.400	0,26728		1.362.671.400	0
ARGO		335.557.450	0	34.727.500	335.557.450	0,10349
ARNA	2.740.000.000	7.341.430.976	0,37322		7.341.430.976	0
ASII		40.483.553.140	0	20.288.255.040	40.483.553.140	0,50115
AUTO		4.819.733.000	0	3.855.786.337	4.819.733.000	0,8
BAJA	1.400.080.000	1.800.000.000	0,77782		1.800.000.000	0
BATA		1.300.000.000	0	1.132.954.500	1.300.000.000	0,8715
BIMA		608.175.716	0		608.175.716	0
BOLT	525.000.000	2.343.750.000	0,224		2.343.750.000	0
BRAM	120.533.848	450.000.000	0,26785	277.153.182	450.000.000	0,6159
BRNA	70.071.700	979.110.000	0,07157		979.110.000	0
BRPT	13.023.999.643	17.791.586.878	0,73203		17.791.586.878	0
BTON	644.000.000	720.000.000	0,89444		720.000.000	0
BUDI		4.498.997.362	0		4.498.997.362	0
CEKA		595.000.000	0	29.700.000	595.000.000	0,04992
CLPI	20.364.500	306.338.500	0,06648	156.230.000	306.338.500	0,50999
CNTX		200.000.000	0	137.310.000	200.000.000	0,68655
CPIN		16.398.000.000	0	59.500	16.398.000.000	3,6E-06
CTBN		800.371.500	0	709.846.300	800.371.500	0,8869
DLTA		800.659.050	0	467.061.150	800.659.050	0,58335
DVLA		1.120.000.000	0	1.031.800.912	1.120.000.000	0,92125
EKAD		698.775.000	0		698.775.000	0
ERTX		1.286.539.792	0		1.286.539.792	0
ESTI		2.015.208.720	0		2.015.208.720	0
FASW		2.477.888.787	0		2.477.888.787	0
FPNI		5.566.414.000	0	5.148.902.750	5.566.414.000	0,92499
GDYR		410.000.000	0	348.500.000	410.000.000	0,85
GDST	8.035.093.922	9.242.500.000	0,86936		9.242.500.000	0
GGRM	17.702.200	1.924.088.000	0,0092		1.924.088.000	0
GJTL		3.484.800.000	0	2.073.452.443	3.484.800.000	0,595
HDTX		3.601.462.800	0	2.760.880.100	3.601.462.800	0,7666
HMSP		116.318.076.900	0		116.318.076.900	0
ICBP		11.661.908.000	0		11.661.908.000	0
IGAR		972.204.500	0		972.204.500	0
IKAI		12.096.181.261	0	2.477.369.656	12.096.181.261	0,20481
IKBI		1.224.000.000	0	1.128.486.000	1.224.000.000	0,92197
IMAS		2.765.278.412	0	1.976.765.774	2.765.278.412	0,71485
IMPC		4.833.500.000	0		4.833.500.000	0

NP	KKK			KKA		
	JSK	JSB	KKK	JSA	JSB	KKA
INAF		3.099.267.500	0		3.099.267.500	0
INAI	88.476.608	196.121.237	0,45113		196.121.237	0
INCI	95.915.307	196.121.237	0,48906		196.121.237	0
INDF		8.780.426.500	0	4.396.103.450	8.780.426.500	0,50067
INDR		654.351.707	0		654.351.707	0
INDS		656.249.710	0		656.249.710	0
INKP		5.470.982.941	0		5.470.982.941	0
INRU		1.388.883.283	0	1.283.649.894	1.388.883.283	0,92423
INTP		3.681.231.699	0	1.877.480.863	3.681.231.699	0,51001
IPOL		6.443.379.509	0	3.395.064.270	6.443.379.509	0,52691
JECC		7.071.923.935	0		7.071.923.935	0
JKSW		151.200.000	0	30.240.000	151.200.000	0,2
JPFA		11.726.575.201	0	7.514.780.366	11.726.575.201	0,64083
KAEF		150.000.000	0	2.000.000	150.000.000	0,01333
KBLI		5.554.000.000	0		5.554.000.000	0
KARW		4.007.235.107	0	2.304.962.599	4.007.235.107	0,5752
KBLM		1.120.000.000	0	180.000.000	1.120.000.000	0,16071
KBRI		8.687.995.734	0	6.515.996.801	8.687.995.734	0,75
KDSI	22.276.200	405.000.000	0,055		405.000.000	0
KIAS		14.929.100.000	0	14.378.410.753	14.929.100.000	0,96311
KICI		276.000.000	0	243.105.780	276.000.000	0,88082
KRAS	153.623.000	1.428.571.500	0,10754	153.255.700	1.428.571.500	0,10728
KLBF		46.875.122.110	0		46.875.122.110	0
LION		520.016.000	0	300.120.000	520.016.000	0,57714
LMPI	688.570.411	1.008.517.669	0,68275		1.008.517.669	0
LMSH	24.565.000	96.000.000	0,25589	30.927.000	96.000.000	0,32216
LPIN		106.250.000	0		106.250.000	0
MAIN		2.238.750.000	0	1.282.143.142	2.238.750.000	0,5727
MASA	1.891.295.999	9.182.946.945	0,20596	2.899.632.000	9.182.946.945	0,31576
MBTO		1.070.000.000	0		1.070.000.000	0
MERK		448.000.000	0		448.000.000	0
MLBI		2.107.000.000	0	1.723.151.000	2.107.000.000	0,81782
MLIA	109.021.300	1.271.994.200	0,08571		1.271.994.200	0
MRAT		428.000.000	0		428.000.000	0
MYOR	5.638.834.400	22.358.699.725	0,2522		22.358.699.725	0
MYTX		1.466.666.577	0		1.466.666.577	0
NIKL		2.523.350.000	0	1.387.842.500	2.523.350.000	0,55
PBRX		6.478.295.611	0	388.690.222	6.478.295.611	0,06
PICO		568.375.000	0	272.875.000	568.375.000	0,4801
POLY		2.495.753.347	0	1.443.805.382	2.495.753.347	0,5785
PRAS		701.043.478	0	113.043.478	701.043.478	0,16125
PTSN	1.240.060.000	1.771.448.000	0,70003		1.771.448.000	0
PSDN	272.378.790	1.440.000.000	0,18915		1.440.000.000	0
PYFA	160.289.311	535.080.000	0,29956		535.080.000	0
RICY	35.114.500	641.717.510	0,05472	209.095.500	641.717.510	0,32584
RMBA		36.401.136.250	0	36.317.403.116	36.401.136.250	0,9977
ROTI		6.186.488.888	0	2.928.561.207	6.186.488.888	0,47338
SCCO		205.583.400	0	24.275.640	205.583.400	0,11808
SIDO		15.000.000.000	0		15.000.000.000	0
SIPD		1.339.102.579	0		1.339.102.579	0
SKLT		690.740.500	0	396.386.250	690.740.500	0,57386
SMBR		9.837.678.500	0		9.837.678.500	0
SMCB		7.662.900.000	0	6.197.612.820	7.662.900.000	0,80878
SMGR		5.931.520	0		5.931.520	0
SMSM		5.758.675.440	0		5.758.675.440	0
SPMA		2.114.570.958	0		2.114.570.958	0

NP	KKK			KKA		
	JSK	JSB	KKK	JSA	JSB	KKA
SRIL		20.452.176.844	0		20.452.176.844	0
SRSN	3.039.953.512	6.020.000.000	0,50498		6.020.000.000	0
SSTM	414.511.265	1.170.909.181	0,35401		1.170.909.181	0
STTP		1.310.000.000	0		1.310.000.000	0
SULI	1.439.240.382	3.986.916.802	0,36099	1.122.031.819	3.986.916.802	0,28143
TBMS		367.340.000	0	316.763.000	367.340.000	0,86232
TFCO		4.823.076.400	0		4.823.076.400	0
TCID		201.066.667	0	122.319.485	201.066.667	0,60835
TIRT		1.011.774.750	0		1.011.774.750	0
TKIM		3.113.223.570	0		3.113.223.570	0
TOTO		10.320.000.000	0	3.911.546.800	10.320.000.000	0,37903
TPIA	2.633.449.995	17.833.520.260	0,14767	13.700.443.835	17.833.520.260	0,76824
TRIS		1.047.587.802	0		1.047.587.802	0
TRST		2.808.000.000	0		2.808.000.000	0
TSPC		4.500.000.000	0	239.796.700	4.500.000.000	0,05329
ULTJ	3.986.948.900	11.553.528.000	0,34508		11.553.528.000	0
UNIC		383.331.363	0	222.647.461	383.331.363	0,58082
UNIT		75.422.200	0	41.323.425	75.422.200	0,54789
UNVR		7.630.000.000	0	6.484.877.500	7.630.000.000	0,84992
VOKS	738.552.585	4.155.602.595	0,17772	1.666.510.165	4.155.602.595	0,40103
WIIM	1.299.935.117	2.099.873.760	0,61905		2.099.873.760	0
YPAS		668.000.089	0		668.000.089	0

Keterangan :

NP : Nama Perusahaan

CSR : *Corporate Social Responsibility*

CSRDi : *Corporate Social Responsibility Disclosure*

CSRI : *Corporate Social Responsibility index*

CSRDi : *Corporate Social Responsibility Disclosure per index*

KA : Komite Audit

ADKI : Anggota Dewan Komisaris Independen

ADK : Anggota Dewan Komisaris

KDKI : Komposisi Dewan Komisaris Independen

KKP : Komposisi Kepemilikan Pemerintah

JSP : Jumlah Saham Pemerintah

KKI : Komposisi Kepemilikan Institusional

JSI : Jumlah Saham Institusional

KKK : Komposisi Kepemilikan Keluarga

JSK : Jumlah Saham Keluarga

KKA : Komposisi Kepemilikan Asing

JSA : Jumlah Saham Asing

JSB : Jumlah Saham Beredar

LAMPIRAN 6**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017**

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN****NOMOR 51 /POJK.03/2017****TENTANG****PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN****BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif dibutuhkan sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai;
- c. bahwa pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 3 -

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peranuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 387, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI
LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN
PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di

- 5 -

7. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
8. Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangkaan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.
11. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJS/L adalah komitmen untuk

LAMPIRAN 6

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1998)

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PSAK No. 1 (Revisi 1998)

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
 2 **NO. 1 (REVISI 1998)**
 3 **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

4
 5 *Paragraf-paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring (bold italic)*
 6 *adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks dengan*
 7 *paragraf-paragraf penjelasan serta Kerangka Dasar Penyusunan dan*
 8 *Penyajian Laporan Keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk*
 9 *hal-hal yang tidak material.*

10
 11 **Pendahuluan**

12
 13 Pemahaman dan dapat dibandingkannya laporan keuangan antar perusa-
 14 haan akan semakin meningkat apabila laporan keuangan disajikan dalam
 15 format yang seragam dan menggunakan deskripsi yang sama untuk pos-
 16 pos yang sejenis. Namun demikian dalam kenyataannya keseragaman
 17 tersebut mungkin sulit diterapkan bahkan dapat menghalangi perusahaan
 18 untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai
 19 dengan kondisi masing-masing perusahaan.

20
 21 Pernyataan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu laporan keuangan
 22 yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
 23 melalui:

- 24
 25 a) penerapan persyaratan dalam PSAK termasuk persyaratan
 26 pengungkapan;
 27
 28 b) pemberian pedoman struktur laporan keuangan termasuk per-
 29 syarat minimum dari setiap komponen utama laporan, kebijakan
 30 akuntansi dan catatan atas laporan keuangan;
 31
 32 c) penetapan persyaratan praktis untuk masalah-masalah yang
 33 berkaitan dengan Materialitas, Kelangsungan Usaha, Pemilihan
 34 Kebijakan Akuntansi dalam hal tidak ada pengaturan oleh PSAK,
 35 Konsistensi dan Penyajian Informasi Komparatif.

36
 37 **Tujuan**

38
 39 Tujuan pernyataan ini adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyajian

- 1 sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai
2 tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai
3 perusahaan yang meliputi:
4 a) aktiva;
5 b) kewajiban;
6 c) ekuitas;
7 d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan
8 e) arus kas.
9

10 Informasi tersebut diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam
11 catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam mem-
12 prediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan ke-
13 pastian diperolehnya kas dan setara kas.

14 Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

15
16
17 06 Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan
18 dan penyajian laporan keuangan perusahaan.

19 Komponen Laporan Keuangan

20
21
22 07 *Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-*
23 *komponen berikut ini:*
24 a) *neraca,*
25 b) *laporan laba-rugi,*
26 c) *laporan perubahan ekuitas,*
27 d) *laporan arus kas, dan*
28 e) *catatan atas laporan keuangan.*
29

30 Informasi Tambahan

31
32 08 Perusahaan dianjurkan untuk menyajikan telaahan keuang-
33 an yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja ke-
34 uangan, posisi keuangan perusahaan dan kondisi ketidakpastian

35
36 09 Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan
37 seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value*
38 *added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan
39 hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap

LAMPIRAN 8
HASIL STATISTIK SPSS 21.0

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	372	.01	.48	.1772	.08926
UKA	372	2.00	6.00	3.0538	.35564
DKI	372	.20	.67	.3903	.08657
KP	372	.00	.90	.0259	.13559
INST	372	.00	1.00	.6364	.26372
FAM	372	.00	.89	.0883	.19870
ASING	372	.00	1.00	.2686	.33583
Valid N (listwise)	372				

Sumber : Data Sekunder diolah 2020

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

HASIL UJI NORMALITAS

Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		372
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08446994
	Absolute	.062
Most Extreme Differences	Positive	.062
	Negative	-.030
Kolmogorov-Smirnov Z		1.200
Asymp. Sig. (2-tailed)		.112

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Sekunder diolah 2020

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.067	.049		1.371	.171		
UKA	.028	.014	.112	2.057	.040	.825	1.212
DKI	.122	.053	.118	2.282	.023	.919	1.088
1 KP	.089	.038	.136	2.359	.019	.742	1.347
INST	-.047	.027	-.138	-1.715	.087	.381	2.624
FAM	-.081	.034	-.181	-2.416	.016	.435	2.296
ASING	.043	.014	.162	2.990	.003	.837	1.195

a. Dependent Variable: CSR

Sumber : Data Sekunder diolah 2020

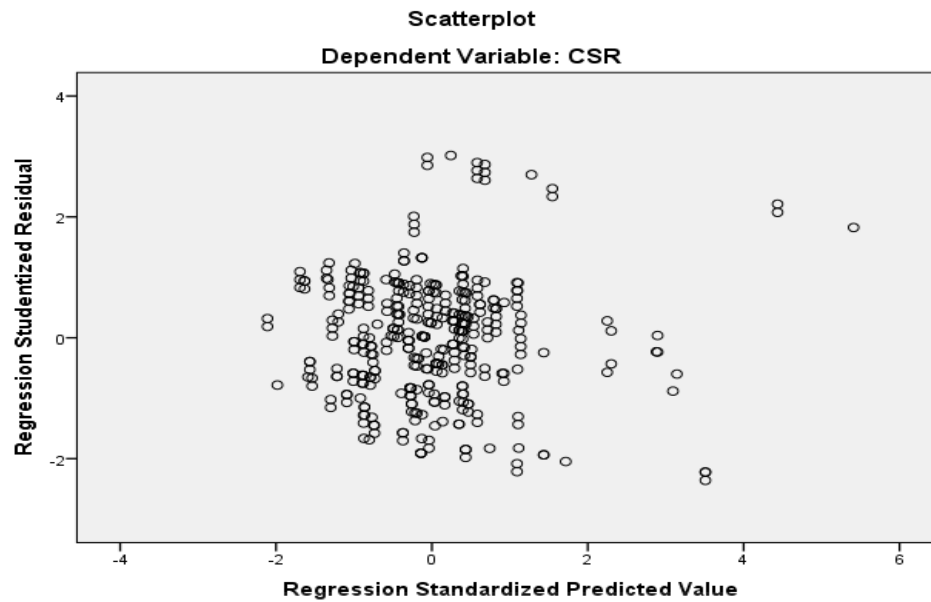
HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.067	.049		1.371	.171
UKA	.028	.014	.112	2.057	.040
DKI	.122	.053	.118	2.282	.023
1 KP	.089	.038	.136	2.359	.019
INST	-.047	.027	-.138	-1.715	.087
FAM	-.081	.034	-.181	-2.416	.016
ASING	.043	.014	.162	2.990	.003

a. Dependent Variable: CSR

Sumber : Data Sekunder diolah 2020



Sumber : Data Sekunder diolah 2020

HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.323 ^a	.104	.090	.08516	1.864

a. Predictors: (Constant), ASING, UKA, DKI, FAM, KP, INST

b. Dependent Variable: CSR

Sumber : Data Sekunder diolah 2020

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Hasil Uji t (t-Test)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.067	.049		1.371	.171
UKA	.028	.014	.112	2.057	.040
DKI	.122	.053	.118	2.282	.023
KP	.089	.038	.136	2.359	.019
INST	-.047	.027	-.138	-1.715	.087
FAM	-.081	.034	-.181	-2.416	.016
ASING	.043	.014	.162	2.990	.003

a. Dependent Variable: CSR

Sumber : Data Sekunder diolah 2020

HASIL UJI ADJUSTED R SQUARED (ADJ. R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.323 ^a	.104	.090	.08516	1.864

a. Predictors: (Constant), ASING, UKA, DKI, FAM, KP, INST

b. Dependent Variable: CSR

Sumber : Data Sekunder diolah 2020